

Pro dan Kontra LGBT di Tingkatan Internasional

AKTUAL

Edisi 50 | 01 - 15 Maret 2016



Muslihat Kereta Cepat

"...ini akibat kebingungan
para pejabat dan
ketidakjujuran para Menteri
kepada Presiden"
(Emil Salim)

ISSN 2337-8395



WWW.AKTUAL.COM

memberi anda
perspektif
yang berbeda ...



aktual.com **AKTUAL** aktual 

Info Dan Pemasaran :

☎ 081517933376 (Dedy) 081280941009 (Rhiza)

✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com

🌐 www.aktual.com

PENDIRI M. Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony

REDAKTUR Wahyu Romadhony, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)
ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M. Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan, Vivin Sri Wahyuni

STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Butho, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Leonina K Lahama, Eko Sumaryanto (Foto Komersial), Agung Rizki, Dadangsaah, Najamuddin Arfah, Refli Mulyadi, Fatah Hidayat Sidik.

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis

NETWORK Tri Wahyudi (Hd), Rendra Muhammad Nur Islam

SMC Resya Muhammad Irgi, Taufik, Iqbal Maulana

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Damai Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A. Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu).

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah
STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P
HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana
SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji
MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi, Rhiza Aditya
ADMIN MARKETING Yulita Trinanda Pangastuti

ALAMAT REDAKSI
 Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810
 Telp. 021 83794508 (Hunting)
 Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com
 iklan@aktual.com

aktual.com
 TERHANGAT TERPERCAYA

aktual

Menyoal Kereta Api Cepat Lagi

Pembaca yang budiman. Edisi kali ini, Aktual kembali mengangkat soal proyek kereta api cepat Jakarta Bandung.

Ada banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan jujur oleh pemerintah. Terutama soal komitmen awal bahwa kereta api cepat ini tidak membebani keuangan negara (APBN).

Di samping itu, ada pertanyaan penting lain yang belum dijelaskan dengan ditel: Apa saja keuntungan proyek kereta api cepat ini untuk rakyat? Atau justru menguntungkan satu dua kelompok kepentingan saja?

Cerita soal kereta api cepat Jakarta Bandung itu akan kami sajikan dalam Laporan utama kali ini.

Di rubrik Aktual Review, soal JK dan Luhut sebagai tokoh penting dibalik gonjang-ganjing kabinet kami jadikan tulisan penting untuk melihat sampai sejauh apa peran kedua tokoh tersebut di balik kepemimpinan Jokowi saat ini.

Di rubrik ekonomi, Ban Indonesia sudah menurunkan tingkat bunga cukup signifikan. Dalam hitungan ekonomi, seharusnya penurunan tersebut akan mampu memberi stimulus untuk menggerakkan sektor riil. Namun pertanyaannya, benarkah langkah tersebut akan mendorong pemulihan perekonomian yang kini dihajar oleh turunnya harga minyak global? Atau justru langkah tersebut hanya menguntungkan sebagian kecil kepentingan bisnis tertentu?

Tulisan lain yang perlu Anda simak adalah soal isu global LGBT. Pro kontra keberadaan LGBT di Indonesia seakan tak

pernah habis diulas dan dibicarakan. Namun, isu LGBT sebenarnya adalah isu global yang dihadapi oleh hampir semua negara yang ada di belahan dunia ini.

Memahami isu LGBT di tingkat lokal juga harus melihat dan mencatat beberapa isu besar LGBT di skala internasional. Akan mudah melihat motif isu LGBT di Indonesia jika kita juga melihat apa saja motif dan isu yang berkembang di skala internasional.

Di, rubrik internasional kali ini, kami akan menyajikan beberapa isu LGBT di tingkat internasional.

Ada beberapa tulisan menarik lain yang sudah kami sajikan di edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Pembaca sekalian...

Redaksi



LAPORAN UTAMA

24 Skema Jahat di Balik Proyek Kereta Cepat

Emil Salim melontarkan kata bahwa kereta cepat adalah bentuk kebingungan pemerintah dan kebohongan para Menteri terhadap Presiden Joko Widodo.



30 Membujuk "Kawan Lama" yang Kecewa

Pilihan pemerintah Jokowi, untuk memberikan megaprojek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada China, membuat Jepang kecewa berat. Pemerintah Jokowi harus menjaga keseimbangan hubungan dengan China, Jepang, dan Amerika.



32 Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Bencana Geopolitik Nasional

Jika estimasi Kusairi benar, maka tak pelak lagi, proyek kereta api Cepat Jakarta-Bandung sejatinya hanya merupakan proyek tersamar untuk menutupi tujuan sesungguhnya yang lebih lebih strategis: Penguasaan Geopolitik wilayah-wilayah yang membentang antara Jakarta-Bandung.



12 AKTUAL REVIEW

JK dan Luhut, Aktor Kunci Sistem Bayangan Pemerintahan Jokowi

Kalau kita telisik secara biografis kedua sosok ini, "perang senyap" kedua pejabat kunci pemerintahan Jokowi ini sejatinya merupakan perang dua "jaringan siluman" yang sama-sama ingin melakukan perembesan kepentingan-kepentingan politik dan bisnisnya ke dalam kantor kepresidenan.

16 JAKARTA RAYA

Kalijodo The End

Kawasan Kalijodo yang memiliki luas 1,4 hektar tersebut nampaknya menjadi kawasan yang tidak tersentuh oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Salah satu sumber Aktual mengatakan, bahwa, tidak mudah untuk bisa memasuki kawasan tersebut untuk melakukan pendataan.

38 EKONOMI

Merajut Berkah dari Era "Bunga Rendah"

Para debitur mestinya bisa tersenyum sumringah di awal tahun ini. Tatkala suku bunga acuan perbankan yang dipatok Bank Indonesia atau BI Rate dua kali berturut-turut turun di pembuka tahun, kantong mereka dipastikan bakal lebih tebal lagi.

42 EKONOMI

BI Turunkan BI Rate dan GWM Primer

Bank Indonesia (BI) kembali melonggarkan kebijakan suku bunga acuan (BI Rate) dan Giro Wajib Minimum (GWM). Setelah sebulan sebelumnya BI menurunkan suku bunga acuan dari 7,5 persen menjadi 7,25 persen, kali ini BI Rate yang semula 7,25 persen diturunkan 25 bps menjadi 7,0 persen. Sementara GWM Primer juga ikut diturunkan dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen atau dipangkas sebesar 1 persen.

46 INTERNASIONAL

Pro dan Kontra LGBT di Tingkatan Internasional

Pro dan kontra tentang LGBT yang marak di Indonesia saat ini sebenarnya juga terjadi di tingkatan internasional, antar-negara, dan di dalam lembaga PBB sendiri. Pertarungan ini masih terus berlangsung.

48 LIFE

Atasi Masalah Kulit Wanita

Masalah umum yang terjadi pada kulit wajah seorang wanita bersumber dari pori-pori wajah yang membesar. Mengingat kondisi di Indonesia beriklim tropis. Sayangnya, banyak perempuan Indonesia merasa tidak sadar bahwa pori-pori besar merupakan masalah kulit wajah serta mengganggu.

Lengkapi kebutuhan informasi terkini dengan mengunduh Portal berita Aktual di smartphone Android Anda. Berita tersaji selama 24 jam dalam 7 hari seminggu dengan standar jurnalistik berkualitas yang meliputi berbagai peristiwa nasional maupun internasional.



Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kanan), State Councilor of the Peoples Republic of China Wang Yong (ketiga kiri), Presiden of China Railway Corp Sheng Guangzu (kedua kiri), Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan (kanan), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kanan), dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) menekan tombol penanda dimulainya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1).

Ini Modus Sebenarnya Proyek Kereta Cepat

Proyek pembangunan kereta cepat ternyata bukan diprioritaskan untuk penumpang namun melainkan untuk memberi peluang bagi pengembang wilayah terutama di sektor properti dalam menjalankan bisnis.

Terbongkarnya motif tersebut menuai respon kekecewaan dari publik, bahkan Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean mengancam proyek tersebut dan mengatakan bahwa pemerintah tidak mengerti tentang konsep pembanguan Indonesia.

“Baru kali ini saya mendengar seorang pejabat berkomentar sebegini. Namanya kereta api adalah tujuannya untuk angkutan penumpang, bukan untuk pengembangan properti,” sesal Ferdinand

Menurutnya, logika pemerintah berbelit-belit yang pada akhirnya akan merugikan negara dan menambah beban bagi rakyat dalam memikul hutang akibat pembiayaan proyek tersebut.

“Jika memang targetnya pengembangan wilayah dan properti, lebih baik gunakan uang yang 70 an triliun itu untuk mengembangkan wilayah tersebut. Tidak perlu dimulai

dengan kereta cepat,” tukasnya.

Lagian menurutnya kebijakan itu terasa aneh, hanya untuk mengembangkan wilayah, namun menggunakan dana dengan cara menghutang yang akan membebankan APBN.

Sebelumnya diketahui bahwa Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki misi yang berbeda dibandingkan dengan kereta biasa.

“Kalau kereta cepat itu beda lagi misinya. Kereta cepat ini kan sebagai pengungkit, sebagai ‘key driver’ untuk pengembangan wilayah. Kalau yang itu kan (kereta biasa) bicara penumpang,” ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (27/2).

Menurut Bambang, banyak orang terkadang salah menilai tujuan dari proyek kereta cepat tersebut. Ia mengatakan, ada keuntungan yang lebih besar terhadap pengembangan wilayah di sekitarnya.

“Jadi tidak bisa ‘apple to apple’. Misinya beda, kalau ini (kereta biasa) angkut penumpang, kalau ini lebih ke aspek wilayah,” katanya. /Sukardjito

Kemenhub: KCIC Bikin Masalah, Tanah Kereta Cepat Ternyata Bebankan APBN

Sistem penggunaan lahan pembangunan proyek kereta cepat akan dibebankan kepada keuangan negara setelah masa konsesi.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator pembanguan proyek ingin menggunakan sistem sewa dan sebagian sistem beli.

Untuk yang sistem sewa, KCIC tidak bertanggung jawab atas biaya sewa lahan setelah masa konsesi berakhir (50 tahun) atau setelah proyek kereta cepat diserahkan ke negara.

Artinya, lahan sistem sewa tersebut akan membebankan keuangan negara karena untuk keberlangsungan operasional kereta, namun lahan yang menggunakan sistem beli, sepenuhnya akan diserahkan kepada negara setelah masa konsesi.

“Masih ada yang dinegosiasikan terutama soal lahan, kalau tanah itu sistem sewa atau bukan tanah KCIC tidak diserahkan ke negara, kan aneh,” kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko usai rapat dengar pendapat di Komisi V DPR-RI (24/2).

Hermanto menceritakan bahwa perihal itu baru terungkap belakangan ini sehingga hal itu belum masuk dalam bahasan sebelumnya.

“Belakangan dia menyatakan bahwa tidak semua tanah itu milik dia (KCIC), yang milik dia aja yang diserahkan, kita nggak mau dong nanti tergantung tanahnya artinya sama saja pakai jaminan dari negara nanti,” pungkas Hermanto. /Arbie Marwan





Tantangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi dengan suara terbanyak tidak mengandung cita-cita kebudayaan. Dalam demokrasi seperti itu, suara mayoritas yang menentukan apa yang benar, bukan ketentuan kebaikan dan keadilan.
(*Sutatmo Suryokusumo*)

Kebudayaan Indonesia terancam oleh individualisme, egoisme dan materialisme Barat. Tanpa menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan, niscayalah kita hanya akan mendapat pergerakan borjuis, yang hanya akan memberi kenikmatan borjuis, yakni orang-orang kaum atasan dan pertengahan, sedangkan rakyat akan terus hidup sengsara.
(*Ki Hadjar Dewantara*)

Bagi orang Indonesia, kebahagiaan sosial merupakan pencapaian harmoni antara individu dan kelompok, antara kelompok dan kosmos. Seluruh kehidupan kita tersusun dari perjuangan terus-menerus menuju tujuan akhir ini hingga kita dapat benar-benar mencapai keseimbangan sosial yang sempurna.
(*Soepomo*)

Demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika tidak bisa berpikir demikian itu, kita nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan dari rakyat itu.
(*Soekarno*)

Jadinya, kita tiada membuang apa yang baik pada asas-asas lama, tidak mengganti demokrasi asli Indonesia dengan barang impor. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, akan tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang.
(*Mohammad Hatta*)

Perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas patahan-patahan lempengan konstitusional yang belum mencapai titik keseimbangan. Politik sebagai teknik mengalami kemajuan,

tetapi politik sebagai etik dan estetik mengalami kemunduran. Perkembangan demokrasi sebagai prosedur mengalami perubahan cepat dan massif, tapi demokrasi sebagai substansi seakan jalan ditempat.

Politik sebagai dimensi manusia secara keseluruhan memerlukan tautan harmonis antara individu

dan masyarakat (mikro-kosmos dan makro-kosmos). Untuk pertautan itu, jembatan penghubungnya adalah etika dan estetika. Etika dan estetika membantu manusia untuk menentukan pilihan yang tepat dalam perkembangan abadi menuju kebaikan, kebenaran, keadilan, dan keindahan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, politik yang baik dengan sendirinya harus merupakan politik yang berkebudayaan.

Setelah lima belas tahun gerakan reformasi digulirkan, pelbagai langkah untuk mendemokratisasikan institusi dan prosedur-prosedur politik Indonesia telah dilakukan dengan sejumlah transformasi yang nyata: pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif bebas dan berkala (meski di sana sini masih ada masalah menyangkut asas fairness), kebebasan berkumpul dan berekspresi, keluasaan akses informasi, desentralisasi dan otonominasi, pemilihan presiden dan pilkada secara lebih kompetitif.

Bersamaan dengan itu, kita juga bisa mencatat adanya perubahan mendasar berdimensikan struktural dan kultural. Pertama, stabilitas demokrasi dimungkinkan oleh terpenuhinya prasyarat konsensus elit (elite settlement). Konsensus elit ini melibatkan pengambil keputusan tingkat tinggi, pemimpin organisasi, politisi, petinggi pemerintah, kaum intelektual, pebisnis, dan pembentuk opini. Keyakinan mereka pada demokrasi membuat demokrasi berjalan.

Elite settlement merupakan faktor krusial yang memberi andil besar pada kegagalan eksperimen demokrasi Indonesia di masa lalu. Namun, gelombang demokratisasi pada era reformasi ini menunjukkan perkembangan positif dalam kemauan yang lebih luas di kalangan elit politik untuk mencapai konsensus. Dengan resistensi yang minimal, para elite setuju melakukan amandemen atas konstitusi. Dengan persetujuan serupa, kita masih perlu melakukan usaha lanjutan agar hasil amandemen itu lebih mendekati

kesempurnaan, bukan makin menjauh dari kesempurnaan. Seturut dengan itu, ada kesepakatan dari para pemegang senjata dengan para elite negeri untuk tidak menghalangi atau membatasi proses demokratisasi. Walaupun masih memiliki modal politik dan posisi tawar yang tinggi, militer—sebagai salah satu aktor terpenting dalam jagat perpolitikan Indonesia—rela meninggalkan gelanggang politik praktis, tunduk pada otoritas sipil.

Bersamaan dengan itu, ruang partisipasi dalam kekuasaan diperluas secara horisontal dan vertikal lewat proses distribusi dan desentralisasi kekuasaan politik sebagai upaya menjaga kesatuan negara. Idealnya, proses ini mengantarkan Indonesia pada partisipasi politik masif dan terbesar dalam sejarah Indonesia maupun dunia. Konsensus oleh bangsa ini mengenai bentuk distribusi kekuasaan merupakan terobosan demokratisasi melalui pendobrakan institusi-institusi pra-reformasi. Meskipun harus segera diberi catatan, bahwa kisruh yang terjadi dalam Pilkada di beberapa tempat menyiratkan masih lemahnya daya-daya konsensus elit yang antara lain disebabkan oleh masih lemahnya tingkat erudisi dan budaya politik demokratik, selain segi-segi yang menyangkut kesenjangan sosial, serta kelemahan pranata hukum dan institusi demokrasi.

Perkembangan ini diikuti pula oleh pencapaian kesepakatan diantara para elite individu maupun kolektif untuk loyal pada institusi dan praktik demokrasi. Apapun latar belakang ideologis dan kepentingan mereka, ada semacam kesepahaman bahwa institusi dan praktik demokrasi membantu tercapainya kemaslahatan umum. Tanpa adanya komitmen dan kepercayaan pada demokrasi dari elite politik, demokrasi hanya akan tinggal wacana.

Kesetiaan pada praktik dan institusi demokrasi dengan mengabaikan latar belakang ideologis

dan identitas ini mengantarkan proses moderasi pemikiran dan ideologi antarkutub yang ekstrem. Elite politik yang berseberangan pun pada akhirnya dipaksa oleh keniscayaan sejarah dan kekuatan demokratis untuk melakukan pendekatan dan negosiasi yang kemudian memoderasi ekstrimitas ideologis, yang dapat mereduksi potensi konflik.

Selain itu, Orde Reformasi juga berhasil menghadirkan sejumlah institusi baru yang relatif berhasil menjadi tumpuan kepercayaan publik pada institusi-institusi negara, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski misi besar reformasi untuk memberantas korupsi masih jauh dari tuntas, kehadiran institusi ini masih mendapat dukungan publik.

Dengan segala perkembangan awal yang menjanjikan itu, bisa dipahami jika banyak kalangan yang menilai bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia sudah berada di jalan yang benar, bahkan ada yang menyebutnya telah menjadi the only game in town, dengan memosisikan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Meskipun terdapat sejumlah capaian positif, kita harus tetap waspada bahwa semua perkembangan ini hanyalah tahap awal dari proses panjang menuju konsolidasi demokrasi dan kemajuan bangsa. Tahap konsolidasi menghendaki perhatian pada segi-segi substantif. Karena di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan, demokrasi melambangkan lebih dari sekadar penghapusan institusi-institusi politik yang represif dan penggantian pemimpin-pemimpin otoriter. Demokrasi menjanjikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsolidasi demokratisasi harus menjamin terwujudnya esensi

demokrasi: yakni, pemberdayaan rakyat (popular empowerment) dan pertanggungjawaban sistemik (systemic responsiveness).

Dalam kerangka pencapaian demokrasi yang lebih substantif, berbagai capaian prosedural itu bisa dipertanyakan, setidaknya dengan menggunakan perspektif Thomas Carothers, wakil presiden Carnegie Endowment for International Peace, Washington, Amerika Serikat. Carothers menggambarkan bahwa sejumlah negara yang awalnya tampak menuju konsolidasi demokrasi kini justru berbalik arah menuju cengkraman otoritarianisme baru atau setidaknya memasuki politik zona abu-abu (gray zone).

Menurut Carothers, di satu sisi, negara-negara tersebut memiliki ciri kehidupan politik yang demokratis, seperti adanya ruang politik, meski terbatas, untuk partai-partai politik oposisi dan masyarakat sipil yang otonom, serta Pemilu yang teratur dan konstitusi yang demokratis. Bersamaan dengan itu, mereka juga mengalami defisit demokrasi yang parah dengan karakternya antara lain adanya representasi politik yang buruk, rendahnya partisipasi politik di luar memilih dalam Pemilu, banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara, Pemilu dengan ketidakpastian legitimasi, semakin rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat dan institusi negara, dan rendahnya kinerja lembaga-lembaga negara.

Pertanyaan pun muncul, apakah Indonesia juga masuk dalam kategori politik zona abu-abu seperti yang digambarkan Carothers? Pertanyaan tersebut penting diajukan karena setelah belasan tahun reformasi bergulir, perkembangan demokrasi sebagai prosedur mengalami perubahan cepat dan masif, tapi demokrasi sebagai substansi seakan jalan ditempat.

Usaha mewujudkan substansi demokrasi, pada kenyataannya terkendala oleh hambatan-hambatan kultural, institusional dan struktural. Pada tingkat kultural, selama era

reformasi, politik sebagai teknik mengalami kemajuan; tetapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Perangkat keras--prosedur demokasinya terlihat relatif lebih demokratis; namun perangkat lunak--budaya demokrasiya masih tetap nepotis-feodalistis; pemerintahan demokratis tidak diikuti oleh meritokrasi (pemerintahan orang-orang berprestasi), malahan sebaliknya cenderung diikuti mediokrasi (pemerintahan orang sedang-sedang saja).

Pada tingkat institusional, desain institusi demokrasi terlalu menekankan pada kekuatan alokatif (sumber dana), ketimbang kekuatan otoritatif (kapasitas manusia); politik padat modal membuat biaya kekuasaan tinggi, mengakibatkan high cost economy; merebakkan korupsi; demokrasi yang ingin memperkuat daulat rakyat justru memperkuat segelintir orang; demokrasi yang ingin memperkuat cita-cita republikanisme dan civic nationalism justru menyuburkan tribalisme dan provinsialisme (putra daerahisme). Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi, kepuasan dan daulat rakyat, justru mengembangkan ketidaksertaan (disengagement), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat.

Pada tingkat struktural, kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi liberal tanpa menyesuaikannya secara seksama dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, justru dapat melemahkan demokrasi. Dalam pembangunan demokrasi terdapat postulat, seperti diingatkan oleh Seymour Martin Lipset, bahwa semakin setara dan sejahtera sebuah bangsa, semakin besar peluangnya untuk menopang demokrasi. Sebaliknya, ketidaksetaraan sosial yang ekstrem dapat mempertahankan oligarkhi atau tirani. Sementara demokrasi menghendaki derajat kesetaraan dan kesejahteraan, pilihan desain demokrasi kita justru seringkali memperlebar

ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Berbeda dengan masyarakat Amerika Serikat yang pada awal pertumbuhan demokrasinya ditandai oleh derajat kesetaraan dalam ekonomi, pendidikan, dan dalam kemampuan mempertahankan diri (pemilikan senjata), prasyarat kesetaraan seperti itu belum hadir di negeri ini. Sebagai masyarakat pasca-kolonial yang terus terperangkap dalam dualisme ekonomi, ketimpangan sosial mewarnai negeri ini. Segelintir orang yang menguasai sektor modern menguasai perekonomian, membiarkan sebagian besar rakyat di sektor tradisional terus termarginalkan. Hal ini berimbas pada kesenjangan di bidang pendidikan—sekitar 70% warga masih berlatar pendidikan dasar. Bertahannya hierarki tradisional feodalisme juga melanggengkan ketidaksetaraan dalam otoritas legal dan kontrol warga atas pemerintah. Dalam multidimensi ketidaksetaraan seperti itu, watak pemerintahan yang akan muncul, Indonesia belum bisa menjalankan demokrasi sejati. Se jauh yang berkembang hanyalah oligarki dalam mantel demokrasi.

Sementara demokrasi kita bercorak oligarkis, kebebasan sebagai paket demokratisasi tidak selalu mengarah pada kesetaraan, melainkan bisa juga memperlebar ketidaksetaraan. Liberalisasi politik yang memacu liberalisasi pemilikan dan perusahaan, dalam lebarnya ketimpangan sosial bisa memperkuat dominasi pemodal besar atas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan. Dalam memperkuat dominasinya, para pemodal bisa menginvasi prosedur demokrasi. Oligarki yang muncul dari situasi seperti itu bukanlah oligarki yang punya empati terhadap penderitaan rakyat, melainkan yang melayani kepentingan pemodal dan dirinya sendiri.

Singkat kata, lima belas tahun Orde Reformasi, demokrasi Indonesia masih menyimpan banyak persoalan, yang jika tidak diatasi secara segera

bisa menimbulkan keraguan umum mengenai kebaikan demokrasi. Meski rakyat bisa saja punya andil dalam menciptakan problem demokrasi ini, masalah utamanya tidaklah pada “sisi-permintaan” (demand-side) seperti sering didalihkan para politisi: rendahnya tingkat pendidikan rakyat, pragmatisme memilih, serta kurangnya kesadaran politik. Sebaliknya terletak pada kelemahan “sisi-penawaran” (supply-side), dari ketidakmampuan aktor-aktor politik untuk membangkitkan kepercayaan rakyat.

Ketidakpercayaan rakyat pada politik timbul manakala partai dan para pemimpin politik tak mampu menjawab masalah-masalah kolektif. Masalah-masalah kolektif ini justru timbul ketika institusi-institusi yang semula didesain untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektif terdistorsikan oleh kepentingan memperjuangkan motif-motif perseorangan. Bahkan partai politik yang dasar mengadanya diorientasikan sebagai interface, untuk menyatukan aspirasi-aspirasi individual menjadi aspirasi kolektif dalam mempengaruhi kebijakan negara, sebagian besar justru dikuasai oleh orang per orang (pemodal besar atau dinasti). Akibatnya tidak ada sandaran untuk memperjuangkan kepentingan kolektif.

Perundang-undangan yang mestinya merupakan “kontrak sosial” dengan warga negara, terdistorsikan oleh kepentingan sempit-sesaat elit politik. Prosedur demokrasi mengalami penjelimitan dan pemborosan sebagai rintangan masuk bagi para pesaing seraya membuka peluang transaksional yang menguntungkan kepentingan oligarki politik.

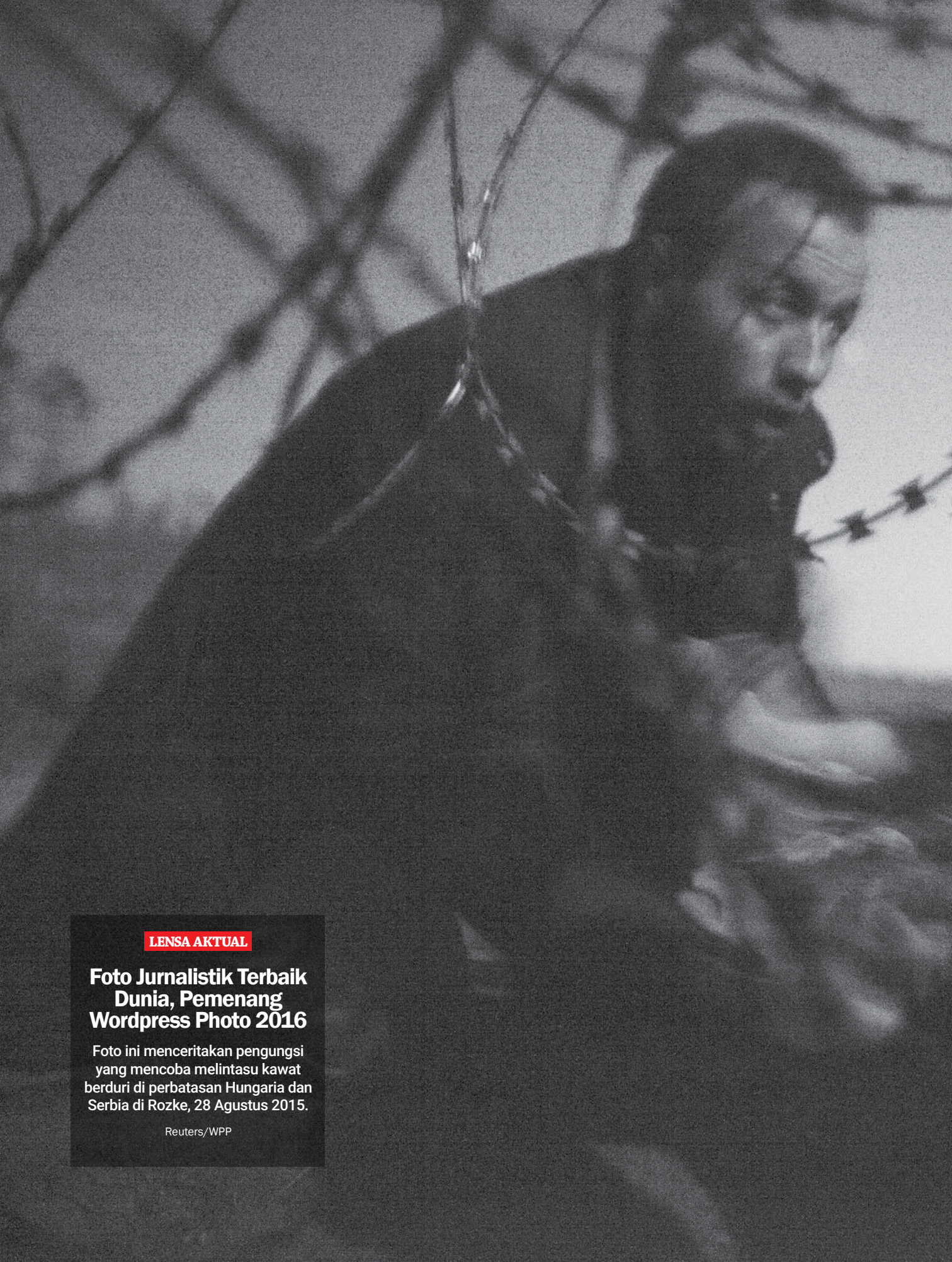
Perubahan politik harus dimulai dari usaha memulihkan rasa saling percaya dan kepercayaan bahwa rasionalitas kepentingan individual tak akan dibayar oleh irasionalitas kepentingan kolektif. Kepercayaan bahwa warga negara akan mendapatkan politik sesuai dengan perilakunya harus diubah dengan

kepercayaan bahwa politik terpercaya akan mendapatkan partisipasi politik yang sepadan degannya. Sekali aktor politik menunjukkan sinyal bisa dipercaya, maka partisipasi dan kepercayaan rakyat pada politik akan menguat.

Pemulihan rasa saling percaya dan kerjasama itu diarahkan untuk mendorong lahirnya semangat restorasi dan transformasi politik demokratik ke arah yang lebih baik. Visi restoratif politik demokratik menekankan pentingnya menjangkarkan pembangunan politik dan demokrasi pada basis nilai bangsa, terutama nilai-nilai Pancasila. Disain institusi politik dan demokrasi harus dapat mengurusi “the cost of power” yang dapat mendorong korupsi politik. Politik dikembalikan kepada khittahnya sebagai seni untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama.

Solusi atas kelemahan demokrasi tidak ditempuh dengan jalan menguranginya, melainkan justru dengan jalan menambahnya agar lebih demokratis. Karena itu, perlu ada pendalaman dan perluasan demokrasi. Pendalaman demokrasi diarahkan untuk menyempurnakan institusi-institusi demokrasi agar lebih sesuai dengan tuntutan kepatutan etis, lebih responsif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat; mengurangi sifat narsisme politik yang hanya melayani segelintir elit politik. Sementara perluasan demokrasi diarahkan agar institusi demokrasi dan kebijakan politik punya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial yang dapat melumpuhkan demokrasi.

Secara singkat dapat dikatakan, ada dua tantangan besar dalam usaha untuk melakukan pendalaman dan perluasan demokrasi. Pertama, tantangan untuk mengembangkan demokrasi yang berkebudayaan. Kedua, tantangan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang kondusif bagi pengembangan demokrasi. ■



LENSA AKTUAL

**Foto Jurnalistik Terbaik
Dunia, Pemenang
Wordpress Photo 2016**

Foto ini menceritakan pengungsi
yang mencoba melintasi kawat
berduri di perbatasan Hungaria dan
Serbia di Rozke, 28 Agustus 2015.

Reuters/WPP





JK dan Luhut, Aktor Kunci Sistem Bayangan Pemerintahan Jokowi

Politik seringkali harus dibaca dari apa yang tersirat, bukan apa yang tersurat. Yang tidak terlihat secara kasatmata, seringkali itulah yang nyata. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, merupakan dua aktor kunci sistem pemerintahan bayangan Presiden Jokowi.

Kalau kita telisik secara biografis kedua sosok ini, “perang senyap” kedua pejabat kunci pemerintahan Jokowi ini sejatinya merupakan perang dua “jaringan siluman” yang sama-sama ingin melakukan perembesan kepentingan-kepentingan politik dan bisnisnya ke dalam kantor kepresidenan. Mari mulai dari Jusuf Kalla.

Sebelum masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pada 1999, Jusuf Kalla lebih dikenal pengusaha pribumi yang tergolong sukses. Sehingga hanya segelintir kalangan saja yang tidak terkejut ketika putra kelahiran Watampone 15 Mei 1942 itu bakal jadi politisi lihai yang disegani baik kawan maupun lawan. Namun, ada penggalan penting



dari riwayat hidup JK yang seringkali luput dari perhitungan lawan-lawan politiknya. Sejak remaja JK sudah berkecimpung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Sulawesi Selatan pada periode 1960-1964. Di priode inilah naluri politik JK berkembang dan menemukan bentuk praktisnya ketika terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa

Islam (HMI) cabang Makasar pada 1965-1966. Di masa-masa paling kritis ketika gerakan mengganyang PKI pas lagi gencar-gencarnya. Tak heran jika kemudian JK kemudian dipercaya jadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanudin sekaligus Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 1967-1969. Di sinilah awal kedekatan JK dengan Sofyan Wanandi, tokoh sentral KAMI yang berasal dari Universitas Indonesia.

Pada momentum inilah, kelak JK masuk golongan eksponen angkatan 1966 sangat diperhitungkan dalam konstalasi politik pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Suharto. Terlebih lagi, JK memiliki basis dukungan yang kuat dan mengakar dari para alumni PII maupun HMI.

Kalau kita baca baik-baik sejarah hidup JK sampai pada tahapan ini, sudah terlihat betapa sejak era 1960-an JK sudah merajut jaringan dan koneksi politik melalui berbagai kiprahnya baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sebuah modalitas politik yang cukup memadai untuk menghantarkan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin ini kelak jadi sosok politisi dan pimpinan nasional yang patut diperhitungkan.

Jaringan dan koneksinya semakin meluas dan mengembang ketika dirinya kemudian memutuskan untuk bergerak di dunia usaha sebagai pebisnis. Sehingga ketika di era Orde Baru, politik dan kekuasaan ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama, putra dari pasangan Haji Kalla dan Athirah ini dengan mudah memasuki dunia politik. Apalagi para eksponen Angkatan 1966 yang dipandang Suharto berjasa dalam mengganyang PKI yang kemudian membuka jalan Suharto jadi presiden menggantikan Sukarno, JK barang tentu masuk dalam lingkaran elit politik yang sangat diperhitungkan.

Meski sekarang jadi Wapres tidak menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik, karena partai

pohon beringin pimpinan Aburizal Bakrie itu mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden, namun jangan lupa bahwa JK merupakan tokoh kunci kelahiran Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR), yang merupakan embrio alias jabang bayi kelahiran partai Golkar di era Orde Baru ataupun Partai Golkar seperti sekarang ini.

Sekber Golkar, diprakarsai oleh beberapa jenderal Angkatan Darat yang pada awal pembentukannya ditujukan untuk membendung pengaruh PKI. Pada 1965 setelah pembentukan Sekber Golkar, JK terpilih sebagai Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (1965-1968). Bahkan pada 1965-1968 itu pula, JK terplilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Karir politiknya semakin melesat, ketika pada periode 1982-1987 terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mewakili Golkar, dan 1987-1999 mewakili daerah.

Dari kiprahnya ini saja, sudah bisa diukur kekuatan jaringan politik JK. Jaringan nya semakin meluas tidak semata di milieu politik, melainkan meluas di komunitas bisnis, ketika berkiprah di Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA).

Bahkan bukan itu saja. Ada investasi politik Jk yang paling berharga, yakni konsolidasi birokrasi di pemerintahan selama 15 tahun terakhir, menjadikan dirinya seorang birokrat dan politisi senior di tanah air. Bayangkan. Tiga jabatan prestisius pernah disandangnya. Ketua Umum Partai Golkar, Menteri dan Wakil Presiden.

Jika ditelusik sejak awal Orde Baru hingga kini, JK sudah memupuk modalitas politiknya berupa jaringan dan koneksi selama 40 tahun. Baik basisnya di HMI, PII, Golkar maupun yang dari luar Golkar. Yang tak kalah penting, geneologi keluarga JK merupakan keluarga besar Muslim Tradisional Nahdlatul Ulama (NU) yang mana ayahandanya Haji Kalla

merupakan tokoh sentral NU. Jadi tak aneh kalau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung JK jadi calon presiden.

Ketika pasangan Jokowi-JK akhirnya berhasil memenangi Pilpres 2014 lalu, maka di situlah persoalan bermula. Ketika formasi kabinet Jokowi-JK diumumkan, hampir semuanya mempunyai irisan, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan JK.

Ibarat investasi politik, posisi JK sebagai pendamping Jokowi sekarang ibarat panen raya, tinggal memetik buahnya. JK kini ibarat memegang secangkir kopi mengaduk PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura, sehingga satu cita rasa yang sama. Karena mereka semua yang tersebar di partai-partai yang berbeda, sejatinya merupakan jaringan dan koneksi yang sudah dia tanam dan rawat berpuluh-puluh tahun. Sehingga basis kekuatan JK dalam *bargaining position* terhadap Jokowi, justru mengandalakan kekuatan koalisi partai. Dan atas dasar itu pula, kepentingan-kepentingan kroni JK baik terkait partainya maupun relasinya yang luas di dunia bisnis, digalang melalui koalisi lintas partai yang sekarang tergabung dalam Koalisi Pro Pemerintah.

Situasi inilah yang membikin resak faksi-faksi politik lain yang sebenarnya juga orang-orang lingkaran dalam kekuasaan Jokowi, namun berbeda misi dan kepentingan kelompok. Pada tataran ini, Luhut Panjaitan merupakan lokomotif yang mewakili gerbong-gerbong politik yang berseberangan dengan jaringan dan koneksi politik yang mengandalkan JK sebagai gerbong politiknya.

Kalau JK, karena investasi politiknya yang sudah dia tanam benih-benihnya melalui basis-basis yang saya sebut tadi termasuk Partai Golkar, Luhut justru malah menjadi tumpuan berbagai kelompok-kelompok kepentingan yang tidak melalui jalur partai.

Rupanya, Megawati yang pada dasarnya sedari awal sudah



menjalin ikatan solid dengan JK, mulai resah dengan adanya gerakan Luhut Panjaitan Cs. Maka dalam Pidato Pembukaan Kongres di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali pada 9 April 2015, Mega melancarkan serangan terbuka yang seolah-olah dialamatkan kepada Presiden Jokowi, padahal sesungguhnya ditujukan kepada gerakan senyap dari Luhut Cs.

Meskipun perang senyap JK versus Luhut sepenuhnya murni soal kepentingan bisnis, namun karena serangan itu ditujukan kepada Presiden Jokowi, maka tema yang dijadikan dasar serangan adalah soal Nawacita dan Trisakti. Dalam pidatonya itu, Mega mensinyalir adanya niatan untuk menguasai

sektor Migas dan BUMN yang ada di Indonesia melalui pemerintahan Jokowi-JK.

Lepas hal itu didasari kekuatiran Mega terhadap manuver senyap dari konsorsium yang merapat kepada Luhut Panjaitan, harus diakui bahwa konsorsium ini memang menggunakan sarana-sarana non partai untuk merembeskan kepentingan-kepentingan bisnisnya melalui Luhut Panjaitan dan Presiden Jokowi. Itulah latarbelakangnya mengapa Mega dalam pidatonya menggunakan jargon: Adanya Persekongkolan antara kekuatan modal dan kekuatan anti partai.

Kalau kita menelisik rekam jejak Luhut yang pernah menempuh pendidikan di Public Administration



Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Kamis (9/4).

Universitas George Washington dan menempuh pendidikan di National Defense University, maka tak heran jika Luhut merupakan “pemain penghubung” pemerintah Indonesia di Gedung Putih maupun Capitol Hill (DPR AS) di Washington.

Pertemuan dengan James R Moffett, pendiri Freeport, meski berlangsung jauh-jauh hari sebelum Jokowi jadi presiden, membuktikan bahwa mantan Duta Besar RI untuk Singapura itu memang merupakan salah satu *the American Lobby* sejak era kepresidenan Gus Dur.

Dengan latar belakang inilah,

Luhut kemudian jadi tumpuan kepentingan berbagai korporasi bisnis seperti James Riady dan Lippo Group di satu pihak, maupun beberapa korporasi Migas dan Pertambangan, khususnya yang punya irisan dan kedekatan dengan Luhut secara pribadi. Antara lain, dengan Medco milik Arifin Panigoro, mengingat kedekatan Luhut sebagai aktivis Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar (KAPPI) Bandung sewaktu masih sekolah menengah atas.

Sebagai anggota KAPPI dan eksponen Angkatan 1966 Bandung, barang tentu hal itu mendekatkan dirinya dengan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Lokal (SOMAL) seperti Ikatan Mahasiswa Bandung, yang pada umumnya berhaluan sosialis-demokrat seperti Rahman Tolleng, Arifin Panigoro, dan lain-lain. Dan kelak di kemudian hari, eksponen aktivis pergerakan mahasiswa 1966 seperti Arifin, kemudian berkiprah di dunia bisnis dan merintis Medco. Dan jadi pengusaha pribumi papan atas berkat fasilitas dan perlindungan dari Ginandjar Kartasasmita, yang ikut menggodok keluarnya Keputusan Presiden Non 10 tahun 1980, sebagai payung hukum untuk membesarkan pengusaha-pengusaha pribumi.

Sayangnya, gagasan dasar Kepres No 10/1980 itu bukan untuk membangun strategi yang terpadu untuk membesarkan pengusaha-pengusaha pribumi dari semua kalangan dan tingkatan baik pusat maupun daerah, tapi semata didasari ketakutan Suharto atas semakin menguatnya pengaruh kekuatan konglomerat Cina seperti Liem Soe Liong, Eka Cipta, Prayogo Pengestu, dan Mochtar Riady. Alhasil, meski yang dibesarkan adalah pengusaha pribumi, tapi semangat dasarnya adalah membesarkan kroni-kroni yang dekat dengan Ginandjar Kartasasmita dan Sudharmono yang ketika Kepres ini keluar merupakan Menteri Sekretaris Negara.

Maka jelaslah bagi kita sekarang,



ketika bocornya rekaman pertemuan segitiga tersebut di atas, sejatinya merupakan cerminan dari perang senyap antara dua kongsi besar, yang sama-sama ingin menjadi komprador Freeport dalam skema perpanjangan kontrak karya untuk 2021. Dan di sinilah, benturan dua kongsi besar tersebut mengerucut pada perseteruan terbuka antara Wapres Jusuf Kalla versus Luhut Panjaitan. Atau pada tingkatan yang lebih teknis, mengerucut pada Perang Perwalian alias *Proxy War* antara Menteri ESDM Sudirman Said versus Luhut Panjaitan, dan Antara Sudirman Said versus Setya Novanto.

Benturan antara dua kongsi besar tersebut semakin nyata adanya, ketika terungkap bahwa salah seorang anggota keluarga JK yang juga pengusaha, telah mengadakan pertemuan dengan James Bob Moffett.

Maka, yang semula merupakan Perang Senyap, akhirnya jadi Perseteruan Terbuka. Tapi, mungkinkah mereka berdua akan meriskir sebuah pertarungan terbuka yang pada gilirannya akan merusak seluruh tatanan sistem pemerintahan bayangan Presiden Jokowi? Saya tidak yakin. *© Hendrajit*

Kalijodo *The End*

Kalijodo, kawasan yang berada di dua wilayah Kotamadya di DKI Jakarta menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Pasalnya tempat yang berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara ini tak lama lagi akan digusur oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Awalnya, Ahok beralasan bahwa

penghuni Kalijodo merupakan penghuni liar yang menempati lahan negara (Ruang Terbuka Hijau).

"Kawasan Kalijodo itu merupakan lahan hijau, dan milik negara juga. Kami hanya ingin mengembalikan fungsi kawasan itu sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Makanya, harus kami bereskan," ungkap Ahok.

Lalu kemudian, Ahok bilang,

tempat ini dinilai tidak memberikan manfaat sama sekali. Di tempat lokalisasi ini, selain terdapat Pekerja Seks Komersil (PSK), juga didapati peredaran minuman keras.

Namun, alasan Ahok yang meyakinkan dia membongkar Kalijodo yakni dengan adanya tragedi Fortuner maut yang merenggut empat nyawa.



Suasana kawasan Kalijodo sebelum penertiban. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata kawasan Kalijodo untuk dibangun taman kota atau ruang terbuka hijau serta Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG).



Nah, Ahok menganggap kasus "Fortuner Maut" sebagai jalan mengakhiri praktik prostitusi yang puluhan tahun mengakar di Kalijodo. Ia ingin menjadikan kawasan itu taman kota.

Pada Senin, 8 Februari, sekitar pukul 04:10 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil merek Fortuner yang dikemudikan Riki Agung Prasetyo. Mobil menabrak sepeda motor di kilometer 15, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Riki rupanya baru saja menghabiskan malam di lokasi hiburan malam Kalijodo. Riki dan teman-temannya membeli 10 botol bir. Diduga kuat minuman beralkohol itu yang menyebabkan Riki hilang kendali atas mobilnya.

Langkah nyata Pemprov DKI untuk menggusur Kalijodo pun benar-benar dilakukan. Salah satu langkahnya yakni Pemprov DKI bahkan menyebarkan surat peringatan agar warga segera membongkar rumahnya masing-masing hingga batas batu sampai dengan SP3 dan dikeluarkan Surat

Perintah Bongkar pada 29 Februari mendatang.

Sejalan kemudian, aparat keamanan pun bersinergi mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menggusur penghuni Kalijodo. Awalnya Pemprov DKI Jakarta 'takut' dengan adanya isu preman Kalijodo yang terkenal kejam untuk mempertahankan lahan 'bisnis lendir' tersebut.

Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Kanavian mengatakan, bahwa Polda Metro Jaya menggelar operasi penertiban sejumlah kegiatan yang prostitusi dan tindak kejahatan lainnya yang sudah berlangsung sejak lama di Kawasan Kalijodo, Jakarta Utara.

"Di Kalijodo itu ada kegiatan-kegiatan ilegal seperti premanisme, peredaran minuman keras ilegal, mungkin juga narkoba, kemudian juga prostitusi, juga tempat berkumpulnya kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Nah itu domain kepolisian," ujarnya, Rabu (17/2).

Tito menjelaskan, oleh karena itu pihaknya akan melakukan operasi

untuk menertibkan hal-hal negatif yang berada di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan demi meminimalisir tindak kejahatan yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Kita hanya menekan tindak kejahatan yang berada di sana maka dari itu kita mendukung pemprov DKI Jakarta" tuturnya.

Tito menegaskan, bahwa pihak Polda tidak melakukan penertiban atas permukiman yang dianggap liar di Kawasan Kalijodo tersebut sebab, itu merupakan wilayah kerja dari pemprov DKI Jakarta.

Namun, Tito menampik bahwa pihaknya akan membantu Pemprov DKI untuk melakukan penertiban permukiman setempat.

"Sekali lagi bukan menertibkan rumah atau menggusur ya, itu domain pemda nanti. Kami hanya akan membantu pemda" tutur Kapolda.

Hanya saja, Tito tidak mengungkapkan kapan dilakukan operasi penertiban berbagai kegiatan ilegal di kawasan Kalijodo tersebut.

"Nanti biar itu pemda yang berikan kapan waktunya," tutupnya.



Foto kiri: Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian (ketiga kiri) bersama Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti (kedua kiri) dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol M. Iqbal (keempat kiri) menunjukkan barang bukti usai melakukan operasi cipta kondisi di kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta, Sabtu (20/2).

Foto kanan: Petugas mengamankan barang bukti saat melakukan operasi cipta kondisi di Kalijodo, Jakarta, Sabtu (20/2).

Sementara itu, kawasan Kalijodo yang memiliki luas 1,4 hektar tersebut nampaknya menjadi kawasan yang tidak tersentuh oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Pasalnya, hingga kini pihak pemerintah tidak memiliki data pasti mengenai kesehatan atau pendidikan di sana.

Salah satu sumber Aktual mengatakan, bahwa, tidak mudah untuk bisa memasuki kawasan tersebut untuk melakukan pendataan.

"Setiap usaha pemerintah untuk mendata selalu dilarang orang di sana (Kalijodo)," ucapnya kepada Aktual di kediamannya, Jakarta Utara, Selasa (16/2) sore.

Hal itu dikarenakan, tiap kali pihak pemerintah datang untuk melakukan sosialisasi program ataupun pendataan, selalu ada orang yang melakukan intimidasi terhadap petugas di lapangan.

"Program-program tidak bisa dilakukan di sana. Jadi kalau ada pendataan ataupun program dari dinas sosial atau dari dinas mana gak pernah bisa masuk. Biasanya kita

sudah ada ancaman dengan omongan ngotot," imbuh dia yang besar di Kalijodo.

Bahkan, niat baik pemerintah untuk membenahi infrastruktur pun mengalami pengusiran oleh penghuni Kalijodo.

"Untuk memperbaiki infrastruktur air saja kita diusir," tuturnya menceritakan.

Meskipun tidak banyak data yang ia miliki, dirinya memberi kepastian jumlah bangunan yang ada di sana.

"Sekitar 60 cafe protistusi, belum termasuk bangunan pedagang nasi, salon, rumah warga. Total keseluruhan ada 188 bangunan," ujarnya.

Ya, media memuat "peringatan" dari para pekerja seks komersial di sana, yang mengatakan bahwa tidak akan mudah mengusir mereka.

Kawasan Kalijodo sudah bertahun-tahun dikuasai penguasa "kapling", mereka yang menjaga tempat itu, termasuk mereka yang kerap disebut sebagai kelompok "tenaga orang". Sedikitnya ada lima bos besar di sana: Riri yang

bergandengan dengan Agus, Haji Usman, Aziz, Bakri, dan Ahmad Resek. Mereka berbagi kawling kekuasaan di Kalijodo. Terakhir tokoh yang muncul yakni Abdul Azis atau yang biasa disapa Daeng Azis.

Saat ditanyakan mengenai rencana pengusuran Kalijodo, dirinya mengatakan bahwa memang sudah saatnya kawasan tersebut dibersihkan agar tidak lagi menjadi sarang penyakit masyarakat.

"Ya kayaknya rencana Pak Ahok ini jadi jalan buat Pak Daeng (Azis) biar bisa sadar. Ketemu jalan yang lurus dapat hidayah. Kan juga Pak Daeng juga udah Haji kalau gak salah, ya?" tutupnya tuntas.

Penetapan Tersangka Kasus Prostitusi Daeng Aziz dan Sikap Permisif Ahok

Penguasa Kalijodo Daeng Aziz ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Bukan atas kasus kepemilikan ratusan senjata di kafe miliknya. Melainkan untuk kasus prostitusi.

Aziz pun bakal dipanggil untuk diperiksa hari Rabu (24/2) lusa nanti. "Sebagai tersangka kasus prostitusi," kata Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti, di Jakarta, Senin (22/2).

Kata dia, tujuh saksi sudah diperiksa terkait kasus perdagangan wanita yang jadikan Aziz sebagai tersangka. Surat pemanggilan pun sudah dikirim. Aziz ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara hari Minggu (21/2). "Dijerat Pasal 296 jo 506 KUHP tentang mucikari," kata dia.

Langkah Polda Metro menetapkan tersangka Aziz untuk kasus prostitusi seperti bertolak belakang dengan sikap

Sesepuh Kalijodo Daeng Aziz (tengah) saat mendatangi kantor Komnas HAM, di Jakarta, Senin (15/2/2016).



Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di mana Ahok mengatakan mengusir Kalijodo bukan lantaran jadi tempat prostitusi, tetapi karena alasan berdiri di lahan hijau.

Kalau itu Kalijodo tidak berdiri di lahan hijau, Ahok mengaku bakal resmikan Kalijodo. "Kalau bisa saya resmikan ya saya resmikan asal sesuai Perda. Itu (Kalijodo) kan masalahnya bukan," kata Ahok, 13 Februari lalu.

Selain itu, kata Ahok, lokalisasi 'kelas bawah' seperti Kalijodo rawan penyebaran penyakit. "Yang kelas menengah ke bawah itu selalu menyebarkan penyakit," ujar dia.

Di Jakarta, kata dia, banyak prostitusi yang aman dari penyakit, seperti di hotel atau apartemen. "Tapi prostitusi (di Kalijodo) tidak mengerti bagaimana *safety sex*," tuding dia.

Diakui Ahok, dirinya tidak permasalahan prostitusi dan tidak bisa menghentikan. Pernyataan yang selalu disampaikan dia saat 'membela' keberadaan prostitusi di Jakarta pun kembali dilontarkan. Yakni, masalah prostitusi sudah ada

sejak lama dan bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di lokalisasi. Sejak zaman nabi kata dia.

Beberapa waktu sebelumnya pun Ahok juga keluaran wacana untuk kebijakan yang 'melindungi' prostitusi. Yakni dengan mengatakan ingin berikan sertifikasi bagi para PSK.

Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, akhir April 2015 lalu mengatakan, Ahok punya ide kalau bisa ada satu apartemen yang berizin khusus untuk prostitusi dengan psk yang bersertifikat. "Ini ide dari Pak Gubernur (Ahok)," ujar dia.

Kata Saefullah, Ahok yakin para PSK akan lebih baik jika mengantongi sertifikat itu. Meskipun Saefullah tak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudnya dengan 'lebih baik' itu. Ditambahkan Saefullah, daripada praktik prostitusi dilakukan diam-diam, lebih baik dilegalkan saja.

Aturan Main PSK Kalijodo "Copy Paste" Gang Dolly

Lokalisasi Kalijodo Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, kini

mulai sepi, menyusul adanya operasi penyakit masyarakat (pekat) oleh petugas gabungan beberapa hari terakhir.

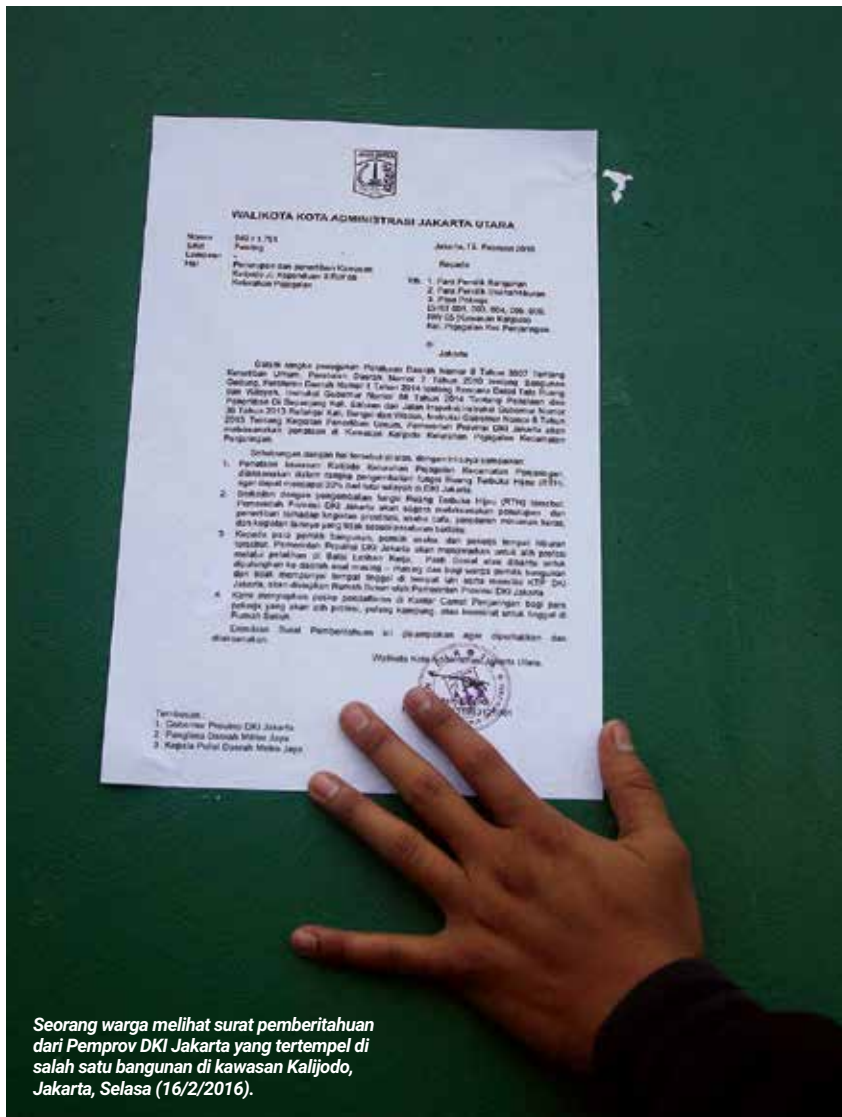
Terlebih, kawasan prostitusi tersebut dalam waktu dekat bakal ditertibkan, menyusul terbitnya surat peringatan pertama (SP1) sampai dengan SP 3 dan dilakukan pembongkaran pada 29 Februari nanti dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Rendahnya tingkat kehadiran pengunjung beberapa hari terakhir, membuat sejumlah wanita tuna susila (WTS) yang biasa memuaskan syahwat pria hidung belang kembali ke kampung halamannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Aktual.com, para WTS tersebut bekerja di beberapa tempat, termasuk Intan Kafe milik pentolan Kalijodo, Abdul Aziz.

"Di Intan Kafe ada 20 PSK (pekerja seks komersial)," ujar sumber, Sabtu (20/2).

Untuk bisa merasakan service WTS di Intan Kafe, pengunjung harus



Seorang warga melihat surat pemberitahuan dari Pemprov DKI Jakarta yang tertempel di salah satu bangunan di kawasan Kalijodo, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

merogoh sekira Rp150 ribu. “Rp40 ribu untuk maminya, sisanya buat PSK,” bebernya.

Berdasarkan salinan buku rekapan kerja WTS Intan Kafe yang diperoleh, dapat diketahui jadwal mereka ‘berkencan’.

Dalam buku itu, WTS yang masuk kerja pada tanggal tertentu, diharuskan mengisi paraf. Bila sedang datang bulan, maka mereka diliburkan.

Buku tersebut menjadi rujukan untuk menggaji para WTS. Sebab, mereka diberikan upah pada akhir bulan sesuai dengan jumlah hari kerja dan banyaknya pria pemburu wanita

penghibur yang dilayaninya.

“Tiap PSK beda-beda jam kerjanya, ada yang siang-malam, ada juga yang cuma malam hari. Jadi kami tidak bisa pegang uang langsung” tandas sumber.

Hampir seluruh kafe di Kalijodo dijadikan tempat prostitusi. Dari sana-lah sumber ekonomi mereka berasal sehingga terus diberdayakan.

Kasubdit Remaja, Anak dan Wanita Ditreskrim Polda Metro Jaya, AKBP Suparmo mengatakan, pekerja seks komersial (PSK) di Kalijodo siap menawarkan nafsu seksual kepada lelaki hidung belang di bilik kamar lantai dua.

“Kalau ada tamu nanti ditawarkan cewek. Kalau mau begituan di atas disediakan kamarnya,” kata Suparmo kepada wartawan di ruangnya, Jakarta, Selasa (23/2).

Tarif PSK itu pun disesuaikan dengan tingkat kecantikan masing-masing PSK. Semakin cantik semakin tinggi pula harganya. Hal itu pun turut menentukan omzet pendapatan per kafe.

Apabila sebuah kafe memberdayakan PSK cantik, pendapatannya pun mencapai Rp 4-5 juta per hari. Bila dalam satu kafe beromzet Rp5 juta setiap malamnya, sementara di Kalijodo ada 66 kafe. Maka, dalam semalam, omzet Kalijodo mencapai miliaran.

“Seharian Rp600 ribu (harga PSK), ada catatannya. Kalau ceweknya cakep, ramai tempatnya,” tambah Suparmo.

Tak hanya menyediakan wanita, kafe tersebut juga turut menyediakan minum keras (miras). Pada umumnya, miras itu didapat dari agen milik Daeng Aziz.

Ingat aturan main booking PSK, teringat Gang Dolly, lokalisasi terbear se Asia Tenggara yang ditutup setahun silam.

Dari hasil melayani tamu, ada aturan bahwa PSK gang dolly mendapatkan bagian 30 persen dari tarif yang ditetapkan oleh pengelola wisma. Pemilik wisma mendapatkan bagian 60 persen, sementara 10 persennya diberikan kepada calo atau makelar yang bertugas mencari pelanggan di depan wisma.

Selain itu, PSK gang Dolly dulunya tidak boleh menerima uang langsung dari para pelanggannya. Pembayaran semuanya dipusatkan di kasir yang ada di ruangan utama wisma.

Di Kalijodo pun juga memiliki aturan sama yakni para PSK bisa menikmati hasil kerja kerasnya pada saat pagi hari setelah semua cafe tutup, yaitu sekitar pukul 04.00 WIB. Pemilik cafe akan membagikan penghasilan mereka setelah dipotong utang-utang. Sukardjito



Petugas mengatur lalu lintas di ruas jalan yang tergenang air di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (26/2).

Gusur Perumahan Elit Pencaplok Lahan Hijau, Berani Pak Ahok?

Warga yang tinggal di bantaran sungai di Jakarta bukan penyebab banjir di Jakarta. Melainkan akibat banyaknya lahan hijau yang jadi tempat resapan air yang beralih fungsi menjadi kompleks perumahan elit atau mal.

“Banyak yang tadinya itu lahan-lahan resapan air tapi malah dijadikan gedung-gedung dan perumahan,” kata Alldo Felix Januardy dari Divisi Penelitian dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, kepada Aktual.com, Jakarta, Rabu (24/2).



Kasus berubahnya fungsi lahan-lahan resapan air di Jakarta, kata dia, marak terjadi di tahun 90-an. Seperti di Kelapa Gading, Pantai Kapuk, Senayan dan Tomang. “Itu semua awalnya daerah resapan. Tiba-tiba tahun 90-an rata-rata sudah berubah jadi daerah hunian,” kata dia.

Alldo pun menantang apakah Ahok berani mengembalikan kawasan hijau yang sudah berubah jadi pemukiman itu kembali ke daerah resapan air.

“Berani nggak dia (Ahok) kembalikan penggunaan lahan, misalnya di Kelapa Gading atau Kapuk menjadi daerah resapan air kembali? Gak mungkin berani!” ujar dia.

Karena takut ‘mencolek’ kawasan pemukiman mewah, kata dia, Ahok lalu malah kambinghitamkan warga miskin yang tinggal di bantaran sebagai penyebab banjir di Jakarta. Sebagai dasar untuk lakukan pengusuran.

/M Vidia Wirawan

Pemberlakuan Plastik Berbayar Serempak Dilakukan di 22 Kota

Sebanyak 22 kota di Indonesia, serentak memberlakukan sistem kantong plastik berbayar yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), guna mengurangi produksi sampah terutama dari bahan plastik.

“Plastik berbayar sekarang sudah diuji coba oleh 22 kota, seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Makassar dan Surabaya. Sistemnya diatur oleh pemerintah provinsi sampai tingkat kota,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (21/2).

Menteri mengatakan pemerintah memfasilitasi dan mendukung seluruh provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan dan desa untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah melalui program kantong plastik berbayar.

KLHK menetapkan harga minimal standar Rp200 untuk setiap kantong plastik, namun sejumlah kota memberikan tarif harga yang lebih tinggi agar masyarakat lebih terbebani dan berinisiatif untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah.

Jika program ini berhasil, Siti mengatakan sistem kantong plastik berbayar akan diatur dalam regulasi Peraturan Menteri. /Zaenal Arifin



Obama: Perdagangan AS-ASEAN Naik 55 Persen

Presiden Amerika Serikat (AS) mengatakan sejak dirinya menjabat, volume perdagangan antara AS dengan ASEAN terdongkrak hingga 55 persen.

“Sejak saya menjabat, kita telah mendorong perdagangan antara AS dan ASEAN hingga 55 persen,” kata Presiden Obama dalam Opening Session pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-ASEAN di Sunnylands Center, Rancho Mirage, California, Selasa (16/2) waktu Jakarta.

Presiden Obama mengatakan dengan kebersamaan, AS-ASEAN dapat melanjutkan upaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan kemitraan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan peluang untuk masyarakat.

Menurut dia, ASEAN saat ini merupakan empat besar mitra perdagangan produk bagi AS, termasuk ekspor AS yang mendukung lebih dari 500.000 lapangan kerja bagi masyarakat Amerika.

“Perusahaan-perusahaan AS telah menjadi sumber investasi asing di ASEAN, itu menjadi salah satu



alasan meningkatnya PDB dalam beberapa waktu terakhir, mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan naik ke kelas menengah,” kata Presiden Obama.

Obama sekaligus mengambil kesempatan pertemuan dengan kepala negara/pemerintahan ASEAN itu untuk mengucapkan selamat

atas terbentuknya komunitas tunggal ASEAN yang dinilainya menjadi langkah penting untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan.

Ia mengatakan dalam pertemuan itu, AS-ASEAN bisa membangun perkembangan dan melakukan lebih banyak hal untuk mendorong kewirausahaan dan inovasi sehingga pertumbuhan dan perkembangan terus berjalan dan inklusif serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Bersama kita juga bisa meningkatkan kerja sama keamanan untuk menghadapi tantangan bersama,” katanya.

Ia menjelaskan dalam beberapa waktu terakhir, AS telah meningkatkan bantuan keamanan maritim kepada para sekutu dan mitranya di kawasan, meningkatkan kemampuan terbaik untuk melindungi pelanggaran perdagangan, dan merespon krisis kemanusiaan.

Dalam pertemuan itu, Obama berharap bisa meningkatkan kebersamaan dan visi dalam menghadapi tantangan kawasan di tengah aturan dan norma internasional. /Ismed

Temukan Indikasi Kerugian Negara di RSSW, Ketua BPK DKI Dimutasi

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta Efdinal, dikabarkan sudah tidak menempati posisinya, mulai Selasa (9/2).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Aktual.com dari BPK RI, dirinya bakal dilantik sebagai pejabat fungsional di lingkungan auditor negara.

“Pelantikannya direncanakan Selasa,” ujar sumber yang enggan disebutkan identitasnya, ditulis Senin (8/2).

Mutasi tersebut, kata sumber tersebut, tak semata-mata karena laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Majelis Kehormatan



Kode Etik (MKKE) BPK terkait dugaan pelanggaran etik Efdinal.

Namun, imbuhnya, bersamaan beberapa kepala perwakilan yang dimutasi, karena ada sejumlah posisi yang kosong.

“Karena ada kepala perwakilan yang pensiun,” jelasnya.

Disinggung jabatan anyar Efdinal, sumber enggan menjelaskan secara rinci. Dia hanya menerangkan. “Dimutasi diagonal.”

Saat Aktual.com coba mengkonfirmasi Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, R. Yudi Ramdan, belum ada jawaban yang diberikan hingga berita ini ditulis.

Melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DKI atas APBD 2014, Efdinal diketahui

menemukan adanya indikasi kerugian daerah Rp191-484 miliar dari pembelian lahan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, oleh pemerintah provinsi (pemprov).

Di tengah menyerauknya kasus tersebut, sekira November 2015, tiba-tiba perwakilan ICW melaporkan Efdinal ke MKKE BPK RI dengan dugaan menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Ini, tercermin dari upaya penjualan sejumlah lahan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur, kepada Pemprov DKI.

Sementara itu, beberapa hari lalu, Inspektorat Utama BPK RI, Mahendro Sumarjo menyatakan, MKKE telah mengeluarkan putusan terkait laporan ICW terhadap Efdinal.

Tapi, dia enggan mengungkapkan hasil putusan tersebut, dengan dalih belum final. “Jadi, masih diproses,” ucapnya. /Zaenal Arifin

SKEMA JAHAT DI BALIK PROYEK KERETA CEPAT

“JOKOWI PRESIDEN SIAPA, ATAU SIAPA JADI PRESIDEN?”



Semisal kata, “bagai air yang direbus”, maka gambaran hingar-bingar terkait proyek pembangunan kereta cepat yang saat ini telah sampai pada tingkat level mendidih. Bagaimana tidak, proyek yang katanya akan menelan USD5,5 miliar atau setara Rp75 triliun ini telah menyita perhatian seantero republik ini.

Tentu banyak hal yang menjadi pertanyaan publik, karena memang sejak awal diduga adanya mufakat jahat secara diam-diam menyajikan 'permainan rahasia di bawah meja'. Sehingga menjadi wajar apabila menyeruak suara sumbang dan ketidakpuasan masyarakat.

Akan tetapi sikap egois dan berbagai penyakit yang acap kali menerima pengambil kebijakan

telah menjadi gumpalan karat yang membuat 'buta, tuli, bisu' sebagai kata yang tepat untuk menggambarkan sikap pemerintahan Jokowi-JK yang mengabaikan hingar-bingar suara rakyat.

Padahal diketahui yang telah angkat bicara dan buka suara bukan hanya segelintir kalangan rakyat yang terpinggirkan dan kaum marjinal semata, akan tetapi suara itu telah



Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Widodo (ketiga kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan), Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (keempat kanan), State Councilor of the Peoples Republic of China Wang Yong (kiri), Presiden of China Railway Corp Sheng Guangzu (keempat kiri), mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan (ketiga kiri) saat 'groundbreaking' pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1).

mata batin pemerintah yang tengah gelap gulita. Emil menyadari secara mendalam, hingga dia melontarkan kata bahwa kereta cepat adalah bentuk kebingungan pemerintah dan kebohongan para Menteri terhadap Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Emil memaparkan bahwasanya dalam melaksanakan pembangunan Indonesia, semestinya semua harus tunduk pada konstitusi dan Visi Besar Presiden yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tertanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

"Perpres No. 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015, tak ada satupun memuat referensi ke rencana pembangunan kereta cepat. Karena itu dapat dikatakan ini akibat kebingungan para pejabat dan ketidakjujuran para Menteri kepada Presiden," cetus Emil dalam keterangan yang diterima *Aktual*.

Dalam dokumen tersebut telah dijabarkan kebijakan pembangunan nasional yakni terdiri dari Agenda Pembangunan Nasional, Agenda Pembangunan Bidang, serta Agenda Pembangunan Wilayah (di masa reformasi berfungsi sebagai pengganti GBHN Orde Baru). Tidak ada satupun memuat rencana pembangunan kereta cepat, sehingga seharusnya tidak ada celah proyek besar ini

dalam bahasa rencana pembangunan. Dengan demikian sangat jelas hal ini membawa kesan yang janggal lantaran menjadi aneh bahwa proyek besar tersebut disepakati tanpa ada melalui perencanaan.

"Apa lagi belum ada kajian secara mendalam dampak pembangunan kereta-cepat ini pada lingkungan," tandas Emil.

Berdasarkan fakta tabel Profil Kerawanan (Buku III Agenda Pembangunan Wilayah) yang dibebaskan oleh Emil, tercantum bahwa wilayah yang akan dilalui kereta cepat mempunyai Index Kerawanan (IRBI 2011) atau potensi bencana yang sangat tinggi. "Wilayah Jabodetabek berpotensi tinggi untuk banjir, Bandung Raya tinggi untuk banjir dan tanah longsor. Sedangkan Bandung Barat tinggi untuk gempa bumi," tukasnya.

Selain itu Emil juga mematahkan dengan telak argumen Rhenald Kasali yang menyatakan proyek kereta-cepat menghasilkan kawasan Transit-Orientasi-Daerah mencakup Halim, Karawang, Walini dan Tegal Luar Bandung. Fakta dan kenyataan, bahwa kawasan tersebut lagi-lagi tidak tercantum dalam

lokasi prioritas kawasan strategis nasional. Sampai di sini sangat terang



bersifat masif dari berbagai penjuru kalangan.

Tokoh Senior yang pernah menjabat sebagai Menteri pada era awal Orde Baru, Emil Salim juga angkat bicara mengenai hal ini. Saking *gregetannya* melihat kebijakan pembangunan kereta cepat yang salah kaprah, dia pun memilih untuk 'turun gunung' memberikan pencerahan kepada

Emil Salim



benderang wejangan dari Emil Salim sebagai orang yang telah aral melintang dan telah banyak merasakan 'asam garam' di dalam jagat pemerintahan. Emil menyimpulkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung 142 Km dengan dana utang ke China USD5,5 miliar tidak hanya akan membawa kerugian bagi negara, namun proyek tersebut telah melanggar Perpres No. 2 tahun 2015 dan IRBI 2011, dan Agenda Pembangunan.

Terlebih lanjut Emil, gagasan proyek tersebut merupakan usulan baru yang menyusul untuk disetujui Presiden, maka seyogianya para menteri yang berkaitan selaku pembantu Presiden harus jujur mengungkapkan segi positif dan negatifnya proyek ini dengan segala dampak yang bisa ditimbulkan olehnya.

Namun kembali Presiden

Jokowi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno seakan menutup mata dan menyumbat telinga dengan mengabaikan begitu saja dan membiarkan perkataan Emil berlalu hampa.

Lantas suara dan petuah-petuah dari mulut siapa yang didengar oleh Presiden Jokowi, jika perkataan Emil Salim selaku sosok guru diabaikannya begitu saja, apakah Presiden mendengar suara rakyat? Tentu jawabannya tidak.

Diketahui petuah-petuah Emil Salim atas Kereta Cepat, tidak berseberangan dengan perasaan rakyat. Suara Emil seiring sejalan dengan suara dan aspirasi rakyat. Mari kita lihat temuan survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM), didapati bahwa 90,3% responden menyatakan tidak setuju dan menolak dibangun moda

transportasi kereta cepat.

"Alasan mereka banyak, tapi yang mendasar adalah mereka menolak dan tidak rela lantaran pembangunan dilakukan dengan dana pinjaman dan menambah beban utang negara," kata Direktur Eksekutif IDM, Widodo Tri Sektianto dalam rilis yang diterima Aktual.com.

Selanjutnya 89,4% masyarakat menyatakan keraguannya terkait dengan kehandalan, keselamatan, dan mutu dari teknologi China untuk membangun kereta cepat tersebut. "Mereka membandingkan bahwa banyak produk-produk dari China seperti alat elektronik dan motor yang bermutu rendah, sehingga mereka meragukan kereta cepat yang sedang diproyeksikan pemerintah," tegas Widodo.

Adapun hal lain yang ditemukan adalah 86,4% masyarakat lebih memilih menggunakan moda

transportasi mobil dan bus untuk berpergian melintasi kabupaten dan kota yang akan dilintasi jalur KA Cepat. Sementara 7,3% memilih menggunakan sepeda motor, dan hanya 6,3% memilih kereta. Hal ini menunjukkan bahwa kereta api bukanlah menjadi pilihan utama masyarakat menggunakan moda transportasi untuk antar kota di Jawa Barat dan Jakarta.

Kemudian 89,6% masyarakat menyatakan bahwa ketersediaan kereta cepat belum dianggap penting saat ini. Hal demikian menggambarkan bahwa kecepatan bukanlah merupakan pilihan utama untuk sampai ke tujuan dalam berpergian, jelas Widodo. Sedangkan yang menganggap penting hanyalah 2,4%, dengan alasan untuk kegiatan bisnis atau sekedar melakukan kegiatan *meeting* yang sangat penting.

Sejumlah temuan di atas didapati dengan mengambil *sample* dari populasi jumlah penduduk di 8 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang mana daerah tersebut akan dilintasi jalur kereta cepat yang sedang diproyeksikan. Adapun daerah yang dimaksud adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Bandung, dan Kabupaten Bandung (Provinsi Jawa Barat), kemudian ditambah DKI Jakarta. Sedangkan total populasi penduduk DKI Jakarta serta ditambah 8 Kab/ Kota di Jawa Barat tersebut, berjumlah 28,7 juta dari hasil catatan BPS.

"Survei ini menggunakan metodologi *multi stage random sampling* dengan jumlah *sample* 1.816 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan *Margin Of Error* (+/-) 2,3%," papar Widodo.

Darmaningtyas

Sedangkan latar belakang responden terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yakni Polisi/ TNI dan PNS sebesar 10,3%, Pekerja di perusahaan Swasta dan BUMN 39,8%, Wiraswasta 19,6%, Ibu Rumah Tangga 17,2%, Pelajar dan Mahasiswa, dan lain lain 13,1%. Rata-rata umur responden antara usia 15-30 tahun sebanyak 34,1%, 31-50 tahun sebanyak 49,7%, dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 16,2%. Tingkat pendidikan responden Lulus SD-SMP 5,6%, Tidak Lulus dan Lulus SMA 37,4%, Tidak Lulus dan Lulus S1 sebanyak 43,2%, Lulusan S2 dan S3 13,8 %. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin responden terdiri dari 47,3 % perempuan dan 52,7 % laki laki.

Jadi, sejumlah angka tersebut menyajikan data yang kuat sebagai dasar untuk mengatakan bahwa masyarakat yang akan bersentuhan secara langsung, menolak pembangunan kereta cepat tersebut.

Perkaranya tidak berhenti sampai di situ, kereta cepat merupakan wujud dari kebijakan oleh Presiden Jokowi yang tidak bijak, karena sangat tidak berkeadilan dalam pemerataan pembangunan serta melukai perasaan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di luar pulau Jawa.

Pengamat transportasi, Darmaningtyas mengaku terheran-heran dengan tingkah Jokowi, pasalnya

lidah dan tangan Jokowi saling tipu satu sama lain, lain diucapkan lain juga yang dilakukan, lain yang dijanjikan lain juga yang diputuskan.

Memang jauh panggang dari api, Jokowi pernah menjanjikan bahwa konsep pembangunan infrastruktur yang akan dipercepat adalah pembangunan di luar pulau Jawa, agar terjadi keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Akan tetapi anehnya kebijakan Jokowi melalui Perpres proyek strategis pembangunan yang disahkan melalui goresan tangannya bertolak belakang dengan apa yang pernah dilafas melalui bibirnya.

"Kalau kita lihat di perpres proyek strategis pemerintah, sangat jelas Jawa menjadi prioritas, padahal di luar Jawa sana, rakyat merayakan dengan tidur di jalan karena jalannya baru di aspal, bayangkan kesenjangan kita di Indonesia sebigitu rupa. Saya orang Jawa, tapi hati nurani saya tidak rela membiarkan pembanguan yang tidak berkeadilan," cetusnya beberapa waktu lalu.

Di sisi lain katanya, pembiayaan pembangunan tersebut dilakukan dengan dana pinjaman, dengan demikian yang menanggung beban utang adalah rakyat seluruh Indonesia. Padahal yang menikmati hanya penduduk di pulau Jawa. "Coba, adilnya dimana? Karena ini utang, yang menanggung orang seluruh Indonesia tapi yang menikmati orang di Jawa," pungkasnya.

Yang lebih membuat perasaan rakyat hancur berkeping-keping bukan hanya sebatas kesenjangan pembangunan, namun yang lebih menyayat hati rakyat adalah terkuaknya tindakan bohong yang berkali-kali dilakukan pemerintah terhadap rakyat.

Diawali alasan *Business to Business* (B to B) yang dikemukakan oleh





Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono, dalam jumpa pers menggugat proyek kereta cepat di Jakarta, Minggu (14/2/2016).

pemerintah dijadikan sebagai alat dalam upaya mengelabui rakyat demikian dikatakan Aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi. Dengan alasan itu pemerintah ingin 'meninabobokkan' rakyat agar seolah-olah tampak dipermukaan tidak ada risiko atas kereta cepat. Padahal, dia mengingatkan B to B telah menyeret Indonesia kepada krisis tahun 1997/1998 karena besarnya utang swasta.

"Pemerintah harus melihat kejadian Krisis 97/98 akibat utang swasta sangat besar. Pemerintah jangan membodohi rakyat," kesalnya. Selain itu, akibat pembangunan tersebut dibiayai melalui dana pinjaman dalam bentuk dolar, maka hal ini akan mengancam devisa negara karena terkuras membayar utang dalam mata uang asing.

Kebohongan pemerintah bermunculan bak jamur di musim

hujan. Sekretaris Jendral Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono berhasil membongkar kebohongan pemerintah yang mengatakan bahwa proyek Kereta Cepat Bandung - Jakarta tidak menggunakan dana APBN. Sasono mengatakan skema pembangunan tersebut banyak melibatkan BUMN yang mendapat dorongan Penyerahan Modal Negara (PMN) yang telah dianggarkan pada APBN 2016.

"Pemerintah telah berbohong mengatakan pembangunan kereta tersebut tidak menggunakan dana APBN, lagian yang terlibat bukan hanya 4 perbankan BUMN, tapi ada beberapa BUMN lainnya yang terlibat melakukan pembiayaan, dan BUMN tersebut dapat dana PMN yang dianggarkan dalam APBN 2016," kata Tri Sasono.

Lebih rinci dia memaparkan terkait skema pembiayaan proyek Kereta Cepat yang sebesar USD5,5 miliar USD, didanai sebesar 75% (USD4,125 miliar dari pinjaman China Development Bank dan 25% (USD1,375 miliar) oleh PT KCIC.

Komposisi kepemilikan saham PT KCIC 60% saham dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN dan 40% dimiliki oleh China Railway Corporation.

Artinya beban 25% pembiayaan Kereta Cepat yaitu USD1,375 miliar yang akan ditanggung oleh PT Pilar SINergi BUMN (yang terdiri dari PT Jasa Marga, PT WIKA, PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT KAI) sebesar USD825 juta atau Rp11,55 triliun. Sedangkan China Railway Corporation menanggung USD550 juta atau Rp7,7 triliun.

Kembali membuka dokumem APBN untuk tahun 2016, ada permintaan anggaran oleh kementerian BUMN untuk memberikan PMN kepada perusahaan tersebut. "Nah ini bukti kebohongan publik dari pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo dan Meneg BUMN Rini Soemarno yang mengatakan pembangunan proyek Kereta Cepat tidak pakai APBN," tegasnya.

Sekarang masyarakat sudah tahu bahwa proyek tersebut akan membuat mereka bertambah

menderita dengan ditambah beban cicilan bunga utang yang harus dibayar kepada pihak China sebesar Rp245 miliar per bulan atau sekitar Rp3 triliun per tahun atas pinjaman USD5,5 untuk pembangunan proyek kereta cepat.

Peneliti Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Gulfino Guevarrato dalam kalkulasinya mengatakan, "Kereta cepat hitung-hitungan tidak masuk untuk bisnis, selain itu rakyat juga akan bertambah beban untuk membayar cicilan utang pertahun hampir Rp3 triliun."

Jumlah utang kereta cepat sebesar USD5,5 miliar jika dikonversi dalam bentuk rupiah (asumsi kurs Rp13.900 per USD) maka jumlah utang sebesar Rp76,450 triliun. Skema pembayaran cicilan terbagi dua yakni 60% atau Rp45,870 triliun dengan bunga 2% pertahun, maka bunga yang harus dibayar Rp1,9 triliun. Sementara sisanya berjumlah 40% atau sebesar Rp30,580 triliun dengan bunga 3,4% pertahun, maka bunga yang harus dibayar sebesar Rp1,05 triliun. Sehingga jumlah keseluruhan cicilan bunga utang atas pembangunan kereta cepat yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia sebesar Rp2,95 triliun pertahun.

Pertanyaanya adalah, ada siasat apa yang membuat Jokowi selaku Presiden Rakyat rela melakukan kebohongan terhadap rakyat serta mengkhianati berbagai regulasi? FITRA mengatakan secara blak-blakan bahwa proyek kereta cepat mempunyai motif jahat, proyek tersebut hanyalah sebagai alat pancingan untuk proyek bisnis dan menguasai lahan PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) yang terintegrasi dengan jalur kereta tersebut.

"Sebenarnya ini hanyalah alat pancingan untuk proyek bisnis yang lebih besar untuk menguasai lahan PTPN VII yang akan disulap menjadi kota mandiri dan dijadikan tempat Transit Oriented Development," kata Manajer Advokasi FITRA, Apung Widadi.

Skema pembangunan kereta cepat dan perumusan UU pengampunan pajak merupakan satu paket yang tidak terpisahkan dalam permufakatan jahat untuk penguasaan lahan PTPN VII seluas 3 ribu hektare.

"Jadi, ini satu paket terintegrasi, kalau pembangunan properti tersebut hanya mengandalkan perputaran uang dalam negeri, jelas tidak cukup, maka dibikin UU pengampunan pajak untuk membawa kembali ke Indonesia uang di luar negeri yang disimpan para pengemplang pajak dan para pelaku korup," tambah Sekjen FITRA, Yenny Sucipto.

Yenni menyampaikan kekecewaan FITRA pada kebijakan pemerintah Jokowi yang memberi pengampunan pajak. Menurut Yenni, UU pengampunan pajak merupakan 'karpet merah' yang diberikan pemerintah kepada para pelaku korup dan pengemplang pajak yang menyimpan uangnya di luar negeri.

Sepertinya permufakat jahat yang dilakukan oleh pemerintah telah terhendus kemana-mana, Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menyatakan hal yang serupa dengan FITRA walau pada kesempatan yang berbeda. Dalam pandangan mata Dani, dia melihat motif jahat yang sangat terang benderang yakni kekuatan besar yang memainkan Presiden untuk mengeksploitasi beberapa lahan yang dilintasi kereta cepat tersebut, diantaranya; Walini (PTPN VII), Gedebage, Cikarang dan beberapa kawasan lainnya.

"Walini, Gedebage, dan Cikarang siapa yang menguasai? Siapa yang akan membangun properti disana akan menjawab motif busuk yang dibelakang Presiden," beber Dani.

Sekarang rasanya sedikit demi sedikit mulai terjawab atas keanehan dan perubahan sikap Jokowi setelah menjabat sebagai Presiden. Sekarang presiden Jokowi memilih jalan yang berpisah dari rakyatnya, ini lantaran suara di sekitarnya membuat dia tunduk hingga tak mampu melihat rakyatnya yang sekarat. Suara di sekitarnya terlalu

merdu hingga memalingkannya dari suara keluh dan kesah rakyat. Wejangan-wejangan orang tua tidak lagi menjadi pusaka bahkan berupaya membantah, merasa gagahnya berkuasa hingga melangkah regulasi seenaknya saja.

Begitulah publik merasa, namun bisa jadi benar kemungkinan lainnya yang disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono bahwa kondisi Presiden Jokowi sekarang sedang dalam tekanan oleh oknum berinisial OS yang datang menjadi *debt collector* karena membiayai saat Pemilihan Presiden 2014 lalu. Akibat tekanan ini Jokowi mengalami 'gangguan saraf' hingga tidak bisa membedakan antara terang dan gelap, antara suara rakyat suara kiamat.

"Inisialnya OS, dia ini keluarga salah satu pejabat pemerintah. OS ini juga dekat dengan Menteri BUMN," ungkapnyanya di Jakarta.

Dirinya mengatakan bahwa sebelumnya mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menyinggung soal keluarga pejabat yang ikut campur dalam proyek kereta cepat tersebut. "SBY sudah benar bahwa ada keluarga pemerintah yang ikut proyek kereta cepat, saya sepakat dengan pernyataan SBY," tutur Arief.

Sebelumnya, SBY angkat bicara soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui media Youtube.

Dalam video wawancara berdurasi 17 menit 24 detik itu, SBY meminta pemerintah menjelaskan ada atau tidak keluarga pejabat ikut berbisnis dalam proyek kereta cepat.

"Begitu saja menuduh keluarga pejabat ikut berbisnis juga tidak baik apalagi kalau itu fitnah. Tetapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada itu," ujar SBY dalam wawancara tersebut.

"Kalau ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis jelaskan saja ada, siapa, *company*-nya apa. Sepanjang tidak melanggar hukum, sesuai dengan undang-undang, negara tidak dirugikan, itu kan tidak apa-apa," pungkas SBY. ■ *Dadang Sah*

MEMBUJUK “KAWAN LAMA” YANG KECEWA

Pilihan pemerintah Jokowi, untuk memberikan megaprojek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada China, membuat Jepang kecewa berat. Pemerintah Jokowi harus menjaga keseimbangan hubungan dengan China, Jepang, dan Amerika.

Mega proyek kereta cepat (*High Speed Train/ HST*) Jakarta-Bandung akhirnya dimenangkan China, karena proposal China dianggap memenuhi semua syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah tanpa menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan tanpa menuntut jaminan dari pemerintah.

Presiden meminta agar kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan skema *business to business* (B to B), tanpa jaminan dan anggaran pemerintah. Proposal Jepang ditolak karena masih menggunakan jaminan pemerintah Indonesia, sesuatu yang tidak diinginkan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Secara teknis pilihan pemerintah RI yang memenangkan proposal China itu “benar.”

Meski demikian, Jepang tetap kecewa berat. Kekecewaan itu karena pihak Jepang yakin sekali bahwa Indonesia akan memilih dirinya menjadi mitra strategis dalam pembangunan transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini karena Jepang telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam pembangunan Indonesia sejak 1970-an. Dalam hal perkereta-apian, produk teknologi Jepang dengan “kereta api peluru” atau Shinkansen-nya juga sudah terkenal keandalannya.

Ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang pada Maret 2015, ia sempat menaiki Shinkansen dan merasa terkesan. Ia mengekspresikan minat yang kuat terhadap teknologi Jepang. Meski demikian, Indonesia toh memilih

China untuk mengembangkan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dilaporkan bahwa Jokowi telah mengadakan diskusi lebih lanjut dengan Presiden China Xi Jinping tentang proyek itu pada 22 April 2015, di sela-sela KTT Asia-Afrika di Jakarta.

Kekalahan dalam proyek kereta cepat ini dipandang sebagai pukulan berat terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe, yang ingin menggiatkan pertumbuhan ekonomi Jepang melalui proyek-proyek infrastruktur di luar negeri. Urusan kereta api ini bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga politis, baik politik dalam negeri Jepang maupun politik luar negeri yang mencakup hubungan Jepang-Indonesia.

“Ini bukan soal hanya persaingan kedua negara, atau persaingan bisnis. Tapi Jepang kan sudah terbukti menjadi mitra strategis kita dalam membangun infrastruktur sejak lama. Bukan ujuk-ujuk datang bawa proposal. Dia yakin kita teman sejawatnya,” ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya sesudah berkunjung ke Jepang, 21 Februari 2016.

Harus Menjaga Keseimbangan

Berurusan dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer besar, seperti Jepang, China, Amerika Serikat, Rusia, dan lain-lainnya, Indonesia selalu mengupayakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam wujud konkret, Indonesia selalu berusaha menjaga keseimbangan relasi dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan itu.

Belakangan, di bawah



Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (kanan), Presiden Tiongkok Xi Jinping (kedua kiri) dalam pembukaan Asian-African Summit yang merupakan puncak rangkaian peringatan ke-60 tahun Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (22/4).

pemerintahan Jokowi-JK, ada kesan bahwa Indonesia agak terlalu condong ke China. Ini menimbulkan “ketidaksukaan” di pihak-pihak yang berseberangan dengan China. China yang sedang mengalami perlambatan ekonomi, justru menginvestasikan dananya secara signifikan di Indonesia. Sebaliknya, posisi Jepang menjadi “agak tersisihkan.” Dari sudut pandang Indonesia sendiri, perluasan hubungan dengan China ini mungkin berguna untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap Jepang.

Bukan cuma di proyek kereta cepat, Jepang tersisih. Kemunduran lain adalah terkait proyek pelabuhan Cilamaya, yang merupakan bagian kunci dari prakarsa Kawasan Prioritas Metropolitan (Metropolitan Priority Area). Ini adalah program pengembangan infrastruktur, yang diimplementasikan oleh pemerintah



sebelumnya dalam sebuah transaksi dengan konsorsium perusahaan swasta-publik Jepang.

JICA (Japan International Cooperation Agency) dan lain-lain mengadakan studi-studi kelayakan untuk proyek ini, yang bertujuan mengembangkan pelabuhan baru di sebuah kawasan, di mana terdapat konsentrasi tinggi perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang, termasuk Toyota Motor. Namun proyek di lokasi Cilamaya itu kini telah dibatalkan, untuk dipindahkan ke lokasi lain.

Alasan resmi pembatalan proyek itu, seperti dikatakan Wapres Jusuf Kalla, adalah “Kita membutuhkan pelabuhan yang lebih aman dan efisien.” Itulah alasan mengapa pemerintah Jokowi-JK tidak mendukung pembangunan pelabuhan baru di dekat Jakarta. Lokasi itu dianggap terlalu dekat dengan anjungan pengeboran minyak lepas pantai, sehingga berpotensi membahayakan pelabuhan dan mengganggu produksi minyak.

Proyek itu masih mungkin untuk diteruskan di lokasi yang berbeda, atau mungkin tetap dilanjutkan

sesuai rencana awal di lokasi yang sama dengan dana sektor swasta. Namun, tetap saja bahwa keputusan pemerintah Jokowi-JK merupakan kemunduran besar bagi pihak Jepang.

Pemerintah Jokowi-JK ingin mengarahkan investasi langsung asing lebih banyak ke arah proyek-proyek yang akan memperkuat pengembangan daerah dan industri yang berorientasi ekspor. Kebijakan baru ini membuat pemerintah RI mengurangi dukungan terhadap beberapa proyek infrastruktur yang dipimpin Jepang.

Perlu Merangkul Jepang

Dengan berbagai latar belakang itu, Bahlil Lahadalia sempat melakukan kunjungan selama sepekan di Jepang, dan ia mengaku menangkap kekecewaan berat dari pemerintah Jepang, terkait kegagalan menggarap proyek HST Jakarta-Bandung. “Makanya kita usul agar Bapak Presiden memulihkan kepercayaan Jepang kepada kita, dengan merangkul dalam berbagai proyek pembangunan lainnya,” tegas Bahlil.

Hipmi menilai, proyek HST tersebut memang *feasible* secara ekonomi-politik, sejauh tidak menggunakan APBN dan tidak merugikan atau menghilangkan aset negara di perusahaan negara, yang menjadi mitra perusahaan China yang menggarap proyek tersebut. Proyek itu diperkirakan menelan biaya Rp 78 triliun atau sekitar 4,3 miliar dollar AS.

Peranan Jepang dalam membangun perekonomian Indonesia selama ini tidak boleh diremehkan. Hipmi Research Center menunjukkan data bahwa Jepang menduduki peringkat ketiga dengan nilai rencana investasi di Indonesia mencapai Rp 100,6 triliun, meski posisinya masih di bawah China dan Singapura. Investasi Jepang pada 2015 tersebut naik 130 persen jika dibandingkan dengan capaian pada 2014 di posisi Rp 43,7 triliun.

Menurut Bahlil, salah satu ciri

khas investasi Jepang di Indonesia adalah sifatnya jangka panjang dan masuk ke sektor riil. Jepang berani membangun manufaktur otomotif, dan masuk dalam investasi yang bersifat labour intensive. Investasi Jepang menyerap banyak tenaga kerja. Komitmennya jangka panjang dan memberi nilai tambah pada perekonomian.

Investasi Jepang memang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Jepang meraih kembali posisi sebagai investor asing terbesar pada 2013. Namun, sekitar 90 persen dana investasi itu pada 2014 diarahkan ke Jakarta dan wilayah sekitarnya. Sebagian besar difokuskan pada sektor otomotif, pangan, dan industri-industri lain yang melayani pasar domestik (domestic driven). Pendekatan Jepang yang Jakarta-sentris ini kurang sesuai dengan tujuan kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi.

Menurut sudut pandang pemerintah Jokowi-JK, konsentrasi pembangunan yang berlebihan di Jakarta memperlambat pengembangan daerah dan memperburuk kemacetan di dan sekitar Jakarta. Pemerintah ingin menyalurkan lebih banyak investasi asing di wilayah luar Jawa. Pemerintah ingin meningkatkan persentase investasi asing di luar Jawa, dari 42 persen pada 2014 menjadi 62 persen pada 2019. Pemerintah juga menginginkan lebih banyak modal bagi industri-industri ekspor, untuk meningkatkan neraca berjalan dan menstabilkan nilai rupiah.

Beberapa pejabat pemerintah juga terganggu dengan pendekatan Jepang dalam berinvestasi di Indonesia. “Jepang menghambat pertumbuhan perusahaan-perusahaan lokal dan hanya mendorong impor bahan-bahan mentah, dan sebagai akibatnya memperburuk defisit neraca berjalan,” ujar seorang pejabat Indonesia, seperti dikutip Nikkei. Dalam posisi inilah, China masuk dan menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah Jokowi-JK. ■ Satrio Arismunandar

PROYEK KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG,

BENCANA GEOPOLITIK NASIONAL

Sedari awal proyek kereta api super-cepat Jakarta-Bandung ini dicanangkan, sudah sarat dengan aneka keanehan dan

misterius. Bayangkan. Ketika pada 6 Oktober 2015 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung yang menugaskan 12 pejabat kementerian dan pemerintah daerah untuk turut membantu mengerjakan proyek ini.

Para pejabat yang dimaksud adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Bupati Purwakarta, Bupati Bandung Barat, dan Walikota Bandung.

Lebih misteriusnya lagi, Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberikan tugas untuk mempermudah perizinan, biaya perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebegitu pentingnyakah proyek ini sehingga harus dikawal 12 pejabat negara? Bukannya yang lazim selama ini tugas pokok kementerian hanya mengawasi satu proyek saja?

Tapi ya itu tadi. Karena sedari awal proyek ini dicanangkan memang

sudah aneh dan misterius, maka keanehan tadi baru sekelumit cerita. Ternyata begitu ditelisik lebih dalam, masih ada beberapa keanehan berikutnya.

Mari kita simak dulu fakta-faktanya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung akan menghubungkan empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Lantas, siapa saja para pihak yang terlibat alias para pemain utama dalam proyek ini? Pada tahap awal, Proyek kereta canggih itu dibangun oleh empat perusahaan konsorsium BUMN. Antara lain PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Melalui pemetaan para pemain utama yang memotori proyek ini, sudah tergambar kan betapa beragamnya para pemain yang berkepentingan di balik proyek ini?

Tapi nanti dulu. Cerita masih belum terlalu lengkap nih. Keempat perusahaan itu tadi kemudian membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang selanjutnya berkolaborasi dengan konsorsium China yang mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT kereta cepat Indonesia China (KCIC).

Nah, di sini cerita semakin menarik kan. Bahwa aroma keterlibatan Cina yang tadinya masih kabur dan remang-remang, sekarang mulai semakin jelas dan terang-benderang. Lantas, apa yang luar biasa dengan fakta bahwa Cina ikut terlibat dalam proyek ini? Bukankah Cina sebagai investor dalam urusan infrastruktur dan transportasi sudah



Petugas kepolisian menjaga lokasi 'groundbreaking' pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1).

hal lazim di Indonesia?

Simak kisah selanjutnya. Untuk mewujudkan proyek ini, PT kereta cepat Indonesia - China (KCIC) masih harus membebaskan lebih dari 500 hektar lahan untuk kebutuhan proyek KA cepat Jakarta-Bandung. Total lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut mencapai 650 hektar.

Bagaimana, semakin jelas kan? Betapa gagasan di balik proyek kereta api super-cepat Jakarta-Bandung ini, ada sasaran geopolitik yang hendak dikejar. Apakah itu gerangan? Untuk menghindari spekulasi atau sekadar menduga-duga tanpa dasar, mari



simak kembali fakta-faktanya. Bahwa kereta api cepat Jakarta-Bandung akan menghubungkan empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar.

Nah, sudah kebayang kan, berapa hektar lahan tanah yang akan jadi sasaran perebutan antar para pengusaha dan aparat birokrasi dengan dalih dalam rangka mensukseskan proyek ini?

Betapa tidak. Pembahasan lahan harus dilakukan dari Karawang hingga Purwakarta sebab hampir semua lahan area tersebut milik warga. Pertanyaannya kemudian, sebenarnya ngotonya Presiden Jokowi dan para kroninya itu karena proyek kereta api cepatnya, atau karena mau menyasar ratusan hektar lahan ini untuk dijadikan pusat

kegiatan bisnis ala SCBD di Sudirman Jakarta-Selatan, atau mungkin malah kayak China Town alias Pecinan?

Baiklah, soal itu nanti dikupas lebih dalam. Sekarang mari kita kembali dulu ke cerita soal kebutuhan lahan tadi, Sementara dari Halim hingga Karawang akan menggunakan lahan milik jalan tol. Selain memakai lahan tol, trase Kereta Api cepat juga akan mempergunakan lahan milik Perhutani di kawasan Kabupaten Karawang seluas 55 hektar dengan rincian panjang sekitar 11 kilometer dan lebar antara 40 hingga 50 meter. Lantaran lahan itu adalah wilayah hutan produksi maka PT KCIC harus mencari lahan untuk penggantinya dua kali lipat yakni 110 hektar. Makin jelas kan agenda tersembunyi di balik proyek ini?

Jangan-Jangan semua ini dilakukan sesuai instruksi taipan Mochtar Riadi ketika berpidato di Konferensi Pengusaha Tionghoa Sedunia beberapa waktu lalu di Bali, yang mana dia menyerukan kepada para taipan rantau di seluruh dunia agar ramai-ramai investasi di Indonesia, di tiga sektor: Infrastruktur, Properti dan Pertambangan.

Apalagi sumber-sumber Aktual menginformasikan bahwa untuk lahan di Walini, kroni bisnis Rini Sumarno, sudah dapat konsesi untuk penguasaan lahan di wilayah ini. Apa ini mau dijadikan pundi-pundi alias mesin keuangan Jokowi dan para kroni politiknya mempertahankan kekuasaannya pada Pilpres 2019? Entahlah.



Yang jelas, dari konstruksi kisah tadi, Aktual jadi teringat peristiwa yang terjadi pada 26 September 2015 lalu, ketika pada Konferensi Pengusaha Tionghoa Sedunia, taipan dan pemilik Lippo Group Mochtar Riady mengajak 3000 pengusaha Tionghoa yang tersebar di seluruh dunia, agar beramai-ramai investasi di Indonesia. Sepertinya, Riady sudah paham betul simpul-simpul jaringan bisnis trans-nasional etnis Cina mana saja yang siap dia gerakkan untuk kuasai bidang properti dan tambang-batubara di tanah air.

Meskipun terdiri dari aneka ragam identitas etnis yang berbeda-beda, namun untuk urusan bisnis, orang-orang Cina rantau itu ternyata cukup kompak dan solid. Bahkan seorang pakar masalah Cina Aihwa Ong, menggambarkan adanya rasa kebersamaan terhadap yang apa yang dia istilahkan sebagai "Identitas Transnasional."

Agaknya, Mochtar Riady dan mitra-mitra strategisnya tahu betul bahwa rasa kebersamaan atas dasar identitas trans-nasional etnis Cina yang menembus batas-batas negara bahwa mereka sama-sama keturunan perantau yang berasal dari Cina, merupakan aset strategis yang bisa digalang untuk menanam investasi di Indonesia.

Lantas, bagaimana memetakan jaringan bisnis trans-nasional Cina rantau yang tersebar di pelbagai belahan dunia? Kalau menelisik jaringan bisnis Cina di Asia Timur dan Asia Tenggara, ada empat lingkaran: lingkaran pedesaan, lingkaran perkotaan, lingkaran regional, dan lingkaran global.

Jadi kalau Mochtar Riady ini bermaksud mengajak para taipan rantau itu untuk membuka lahan-lahan baru di Indonesia, keempat jaringan tersebut nampaknya sudah berada di tangan jurangan Lippo Group dan salah seorang anggota tim sukses Presiden Jokowi tersebut. Betapa tidak. Keempat lingkaran tersebut sudah sekian puluh tahun terjalin menjadi jaringan-jaringan bisnis yang ekstensif yang bisa



diandalkan untuk dengan cepat memobilisasi dan mendistribusikan modal barang kebutuhan produksi dan konsumsi, maupun informasi.

Indonesia pun barang tentu juga termasuk dalam jaringan empat lingkaran tersebut. Sekadar mengambil ilustrasi di Kalimantan Barat, jaringan bisnis etnis Cina lingkaran pedesaan sudah dirintis sejak 1930-an, yang kemudian bisa kita anggap terus berlanjut pada pertengahan dekade 1960-an. Bahkan diyakini hingga kini.

Dalam jaringan lingkaran pedesaan ini, para pedagang Cina telah mendirikan pos-pos dagang di pedalaman Kalimantan Barat untuk mengumpulkan produk hutan seperti rotan, resin, dan karet dari orang Dayak. Jaringan bisnis lingkaran pedesaan ini terintegrasi dengan jaringan bisnis etnis Cina di lingkaran perkotaan.

Mereka ini berhubungan dagang dengan diler dan importir etnis Cina yang berada di daerah perkotaan.

Selain mengambil barang konsumsi, mereka juga menjual produk-produk hutan yang mereka kumpulkan dari orang-orang Dayak untuk diekspor ke Singapura.

Mata-rantai jaringan Cina di lingkaran desa dengan para pedagang Cina di perkotaan semakin solid ketika para eksportir dan importir Cina yang tinggal di perkotaan, misalnya di Pontianak dan Singkawang, kemudian menjalin hubungan kredit dengan para pemodal Cina yang tinggal di Singapura.

Bukan itu saja. Selain menangani ekspor, para pedagang Cina dari lingkaran perkotaan tersebut ternyata juga menyediakan berbagai komoditi yang bisa diperoleh dari importir-importir Cina di kota-kota pesisir yang lebih besar untuk dijual ke desa-desa di pelosok-pelosok pedalaman.

Dari gambaran selintas ini saja, sudah terlihat jelas adanya jaringan dagang lintas-nasional yang merentang dari pedalaman hutan



Sesi foto bersama sejumlah pengusaha dalam pembukaan Konferensi Pengusaha China Dunia ke-13 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (26/09/2015).

di Kalimantan Barat ke kota-kota pantai di daerah tersebut sampai ke Singapura. Alhasil, dengan jaringan dagang yang membentang dari lingkaran pedesaan ke lingkaran perkotaan dan ke lingkaran regional ini, maka praktis para pedagang Cina telah menguasai perdagangan di pedalaman Kalimantan Barat. Dan dengan jaringan bisnis yang umurnya sudah puluhan tahun itu, tak bisa digantikan oleh orang-orang Dayak yang mungkin hanya mempunyai jaringan dagang di daerah-daerah pedesaan saja.

Cerita tentang kiprah jaringan pedagang Cina di Sumatera Selatan dalam menguasai perdagangan dan pemrosesan karet juga persis sama. Adanya mata-rantai yang solid antara lingkaran pedesaan, perkotaan dan regional. Sampai 1920-an, para pedagang Melayu memainkan peran yang dominan sebagai pedagang perantara yang membawa karet dari desa-desa ke kota pelabuhan Palembang.

Namun ketika permintaan dan produksi karet meningkat dengan cepat dalam dasawarsa 1920-an, orang-orang Cina-lah yang kemudian memenangkan persaingan. Pada 1930-an, orang-orang etnis Cina sudah mendominasi perdagangan perantara, dan mereka mendirikan dua pabrik pengolahan karet terbesar di Palembang.

Yang pertama adalah Hok Tong, milik seorang etnis Cina yang tinggal di Singapura, dan yang satunya adalah Kiang Gwan, sebuah perusahaan dagang dari Kelompok Oei Tiong Ham, yang merupakan kelompok usaha etnis Cina terbesar di Asia Tenggara di era sebelum Perang Dunia II.

Kiang Gwan punya cabang di Bombay, Kalkuta, Karachi, Shanghai, Hongkok, Amoy Singapura, dan London. Dari sekelumit cerita ini, bisa disimpulkan bahwa kemenangan Cina dalam persaingan bisnis pribumi Sumatera Selatan berkat jaringan mereka yang rapi dan solid. Yang mana jaringan dagangnya merentang dari desa-desa sampai ke kota pelabuhan Palembang, Singapura, bahkan sampai ke India dan Cina.

Kiprah jaringan bisnis trans-nasional Cina ini semakin nampak jelas melalui modus operandi perdagangan beras di akhir abad-19 dan abadi ke-20. Yang menggambarkan juga adanya mata-rantai yang solid dari jalinan bisnis Cina di lingkaran pedesaan dengan lingkaran kota pelabuhan. Beras didatangkan ke Singapura dari Thailand, Burma dan Indo-China, dan kemudian diekspor kembali ke Semenanjung Malaya dan Hindia Belanda (Indonesia). Lalu sisanya dikirim ke Borneo.

Terkait jaringan Cina, perdagangan beras antara Thailand dan Singapura dilakukan melalui jaringan dagang regional dari etnis Teochiu. Mayoritas pedagang beras

Thailand adalah etnis Cina Teochiu yang punya asosiasi lokal dan regional. Sehingga pedagang beras Teochiu di Thailand berhubungan erat dengan pedagang beras di Singapura dan Hongkong, yang juga merupakan anggota asosiasi-asosiasi Teochiu, dan dengan demikian membentuk jaringan bisnis regional Teochiu.

Maka itu, ketika Mochtar Riady menyerukan kepada 3000 taipan rantau di seluruh dunia agar bersedia investasi di Indonesia, bisa dipastikan pola jaringan pebisnis Cina berbasis etnis inilah yang digalang oleh pemilik Lippo Group ini. Setidaknya, dengan menggolongkan jaringan bisnis regional Cina yang membentang dari Cina (Asia Timur) sampai ke Indonesia (Asia Tenggara).

Apalagi Mochtar Riady dan kroni-kroni bisnisnya, sejak 1993 tercatat merupakan yang paling agresif menanam modal di Tiongkok, tanah leluhurnya. Sedemikian rupa sehingga tak mudah untuk merinci semua investasi Lippo di daratan Tiongkok. Khususnya di Fujian, kampung halaman leluhur Mochtar Riady yang bernama asli .Li Wen Zheng.

Melalui investasinya di Tiongkok Selatan dan Fujian pada khususnya, Mochtar dan Lippo membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan perumahan. Proyek-proyek itu dibangun di kota Fuzhou, Ibukota Fujian.

Juga pada April 1993, di provinsi Shandong, Lippo juga punya proyek. Bersama pemerintah setempat, membangun infrastruktur senilai 350 juta dolar AS. Di sini, Lippo bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan konsorsium untuk memobilisasi dana sebesar 300 juta dolar AS.

Ajakan kongsi bisnis melalui patungan atau urunan nampaknya memang modus bisnis Mochtar Riady yang menarik untuk dicermati. Pada April 1993, di provinsi Shandong, Lippo juga punya proyek. Bersama pemerintah setempat, membangun infrastruktur senilai 350 juta dolar

AS. Di sini, Lippo bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan konsorsium untuk memobilisasi dana sebesar 300 juta dolar AS.

Seperti halnya juga ketika Lippo mengadakan patungan pendirian bank secara offshore dengan menyeter modal sebesar 50 juta dolar AS. Selain itu, Lippo juga membeli kawasan seluas 325 ribu kaki persegi di atas rencana stasiun bawah tanah di Giuangzho.

Bahkan lebih dari itu, Mochar dan Lippo juga meramah ke sektor keuangan dan sekuritas di Tiongkok. Dengan mendirikan perusahaan sekuritas di Shenzhen dan Shanghai, melalui pembelian The Nanhai Commercial Bank.

Karena itu tak heran jika dalam seruannya kepada 3000 taipan rantau di seluruh dunia, Mochtar Riady sang pemilik Lippo Group, menganjurkan agar mengincar sektor properti, infrastruktur dan tambang batubara di Indonesia.

Mochtar Riady bukan fenomena tunggal. Justru ini menggambarkan gejala umum bahwa sejak Deng Xio Ping mengizinkan investor asing menanam modal di Provinsi Cina Selatan, dibandingkan penanam modal asing lainnya, para pengusaha etnis Cina-lah yang paling banyak menggandeng perusahaan-perusahaan Cina Daratan yang tentunya diresmi pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC).

Jaringan Bisnis Trans-Nasional Cina di Indonesia

Sekadar informasi, sejak 1967 sampai sekarang, pengusaha Cina dari Singapura, Hongkong, dan Taiwan, masih merupakan penanam modal terbesar di Indonesia. Modal yang mereka tanam di Indonesia lebih besar dari penanaman modal Jepang, Inggris, maupun Amerika Serikat.

Berita buruknya adalah, hal ini menunjukkan betapa jaringan regional Cina telah menjangkau ke dalam perekonomian Indonesia melalui cara penanaman modal asing. Parahnya lagi, hal berlangsung dua arah. Jadi ketika pengusaha Cina

Indonesia bermaksud melakukan ekspansi ke luar negeri, strategi yang mereka lakukan adalah pertama-tama mendirikan perusahaan di Hongkong atau Singapura untuk memanfaatkan sumber-sumber modal etnis Cina dan mengembangkan jalinan dengan berbagai jaringan bisnis Cina.

Menurut data yang disampaikan oleh Dr Alexander Irwan dalam artikelnya bertajuk Jaringan Bisnis dan Identitas Etnis Trans-Nasional, dari 22 perusahaan etnis Cina dari Indonesia yang masuk ke dalam daftar “Mereka yang Berekspansi ke Luar Negeri,” 21 mempunyai perusahaan kalau tidak di Hongkong di Singapura, atau sekaligus di kedua tempat tersebut.

Berarti, ketika kalangan bisnis Cina dari Asia Timur dan Tenggara memperluas jaringan mereka ke Indonesia, pada saat yang sama pengusaha-pengusaha etnis Cina Indonesia meningkatkan kepekatn jaringan bisnis regionalnya dengan jalan melakukan investasi di Asia Timur dan Tenggara.

Sarana yang digunakan untuk membentuk jaringan regional didasarkan pada kesamaan daerah asal-usul, seperti terlihat melalui kiprah organisasi International Federation of Futsing Clan, sebuah asosiasi regional pengusaha Cina di Asia Timur dan Asia Tenggara. Asosiasi yang berkantor di Singapura tersebut punya perwakilan di Jepang, Hongkong dan Macau, Taiwan, Malaysia, Singapura, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Ujung Pandang dan Amerika Serikat.

Anggota asosiasi terdiri dari para bankir, industriawan, importir dan eksportir besar, sub-kontraktor, pedagang dan pedagang eceeran yang lebih kecil. Jaringan mereka merentang dari lingkaran regional sampai ke lingkaran lokal. Adapun kekuatan mereka terletak pada bentuk-bentuk kerjasama antar anggota asosiasi tersebut.

Sedemikian rupa besarnya pengaruh jaringan bisnis regional Cina di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, pemerintahan Cina daratan di Beijing pun menyadari potensi finansial

yang dimiliki kelompok Cina rantau ini. Maka di sinilah menariknya kebijakan *double standard* pemerintah Cina terhadap para taipan rantau tersebut.

Dari sudut pandang ideologis Partai Komunis Cina, para taipan lintas negara ini merupakan musuh negara akibat kekayaan yang mereka miliki karena masuk golongan “kelas kapitalis.” Tapi ini hanya berlaku untuk konsumsi dalam negeri. Ke luar negeri, pemerintah Cina justru bersikap lunak, bahkan cenderung melindungi kelas kapitalis ini.

Para Taipan Semakin Diuntungkan Melalui Kebijakan Reformasi Deng Xio Ping

Lepas dari sikap mendua pemerintahan Cina daratan terhadap para taipan rantau, namun sejak 1978 menyusul diterapkannya Kebijakan Reformasi dan Keterbukaan (*gaige kaifang*), pragmatisme pemerintahan Deng Xio Ping justru memberi angin kepada para taipan rantau. Bukan lagi kemiskinan dan kebodohan yang dipuja-puja melainkan harta dan kepandaian.

Deng Xio Ping, yang merupakan tokoh sentral reformasi Cina, mengumumkan diterapkannya kebijakan “Empat Modernisasi” yang meliputi pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi dan pertahanan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah Cina secara bertahap memakai sistem ekonomi pasar, menggantikan sistem ekonomi komando. Maka, rakyat Cina baik yang di desa maupun yang di kota, diizinkan untuk berwiraswasta. Berbinis.

Modal boleh diperoleh dari luar Cina, demikian pula teknologi dan ketrampilan. Sehingga praktis sejak saat itu Cina membuka pintu lebar-lebar terhadap dunia luar, terutama dari dunia barat.

Di sinilah kemudian, jaringan bisnis regional etnis Cina yang tersebar di seluruh dunia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara, mendapat dukungan strategis dari pemerintahan Cina. Karena dalam skema reformasi ekonomi Deng, jaringan bisnis trans-

Pekerja menaiki tangga tangki Stasiun Pengumpul Tambun di Field Tambun Pertamina EP, Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (12/2).

nasional Cina dipandang memiliki potensi modal untuk diikutsertakan dalam pembangunan perekonomian Cina daratan.

Sehingga sejak 1984, pemerintah Cina menerapkan kebijakan untuk melindungi apa yang mereka istilah sebagai Hoakiau atau overseas China, yaitu warga Cina yang berada di luar negeri namun tetap ada ikatan dengan leluhurnya di Cina Daratan. Berarti termasuk para taipan rantau tersebut berada dalam perlindungan otoritas politik Cina. Termasuk para taipan seperti Mochtar Riady, Liem Soe Liong dan Eka Cipta. Karena mereka dimasukkan dalam kategori orang-orang yang punya potensi keuangan/finansial.

Dengan kata lain, otoritas politik dan angkatan bersenjata Cina mendukung dari belakang layar, sedangkan para taipan ibaratnya merupakan pasukan penyerbu yang ditugaskan untuk membuka lahan-lahan baru untuk kepentingan nasional Cina.

Setidaknya itulah agenda tersembunyi Mochtar Riady ketika mendukung terselenggaranya Konferensi Pengusaha Tionghoa Sedunia ke-13 di Nusa Dua Bali, yang dibuka secara simbolik melalui pemukulan gong oleh mantan presiden dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Dan pidato sambutan pembukaan oleh Menteri Koordinator Politik-Hukum-Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Sekarang, mari kita kembali segi paling rawan di balik proyek ini, yaitu terkait penguasaan lahan tanah. Analisis M Kusairi, salah seorang pelaku migas dan research associate Global Future Institute, kiranya layak untuk disimak.

Menurut alumnus Fisip Universitas Nasional itu, ketika sejumlah kurang lebih 600-an hektar tanah telah dikuasai konsorsium Cina, bagaimana manajemen



pengelolaan lahan Sumber Daya Alam) kita tersebut? Apakah kita masih memegang azas penguasaan SDA oleh negara (state property), atau akan melepaskan pada pengelolaan swasta (private property, baik individual maupun corporation)?

Ataukah akan membiarkan itu menjadi pengelolaan sekelompok orang (*common property* atau *communal property*)? Atau memang itu menjadi wilayah yang terbuka (*open access*), sehingga siapapun bisa menguasai?

Dalam bacaan Kusairi, di kawasan seputaran Karawang-Purwakarta, masih terdapat kandungan minyak yang cukup besar, masih terdapat ribuan sumur-sumur tua yang kandungan minyaknya masih lumayan besar. Menurut kesaksian Kusairi, yang pernah menelisik keberadaan sumur-sumur minyak tua mendampingi John Karamoy, bekas Presdir Medco dan orang Indonesia yang sempat memiliki posisi strategis sebagai VP di Stanvac (Perusahaan minyak Amerika), potensi minyak di seputaran kawasan Karawang-Purwakarta masih cukup besar. Apa jadinya kalau penguasaan lahan dan SDA itu jatuh ke tangan Cina?

Dalam pengamatan Kusairi, nilai geopolitik dan geoenergi Karawang misalnya, sesungguhnya, kalau merujuk Peta Migas masa lalu (zaman Soekarno), Kerawang sesungguhnya

masuk pada wilayah yang disebut sebagai TAMBUN (Tambang Minyak Bumi Nasional) -- bahkan ada yang menyebut "Brunai" nya Indonesia.

Lebih lanjut Kusairi menginformasikan, PT Pertamina EP sendiri saat ini memiliki sumber minyak yang paling besar dari wilayah Babelan Bekasi, sekitar 100-an ribu barel per hari. Boleh jadi reservoir wilayah Babelan Bekasi masih dapat ditarik garis lurus dengan eservoir wilayah Kerawang.

Maka Kusairi merasa perlu mengingatkan: "Saya berfikir, terlalu riskan bagi Cina kalau masuk hanya untuk kebutuhan infrastuktur Kereta Cepat. Perlu dipikirkan memang dampak ikutan dari kebijakan mendukung proyek kereta api cepat itu dalam kerangka ekspansi sumber daya energi, yang saat ini masih menjadi agenda strategis dan sasaran pokok pemerintahan Cina."

Jika estimasi Kusairi benar, maka tak pelak lagi, proyek kereta api Cepat Jakarta-Bandung sejatinya hanya merupakan proyek tersamar untuk menutupi tujuan sesungguhnya yang lebih lebih strategis: Penguasaan Geopolitik wilayah-wilayah yang membentang antara Jakarta-Bandung.

Bila ini benar-benar terwujud, maka bencana geopolitik Indonesia sudah diambang pintu. Hendrajit

Merajut Berkah dari Era "Bunga Rendah"

Para debitur mestinya bisa tersenyum sumringah di awal tahun ini. Tat kala suku bunga acuan perbankan yang dipatok Bank Indonesia atau BI Rate dua kali berturut-turut turun di pembuka tahun, kantong mereka dipastikan bakal lebih tebal lagi.

Bukan apa-apa memang. Dengan pemangkasan BI Rate itu asa mereka dapat lebih terang lagi. Soalnya, beban berat suku bunga pinjaman tinggi yang selama ini mereka pikul, kini dapat lebih ringan. Namun, kenyataannya tak semulus harapannya.

"Faktanya, kami masih dapat suku bunga kredit tinggi. *Double digit*," kecam Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kantornya, akhir Februari lalu.

Hariyadi mungkin sosok yang mewakili kalangan pengusaha besar, yang berarti juga bisa disebut debitur kakap. Mestinya ia mendapat banyak insentif dari kreditur, karena bisa jadi pemilik usaha Sahid Group ini meminjam dalam jumlah besar. Tapi faktanya tidak.

Ia menuding, dengan suku bunga tinggi seperti saat ini berat bagi perusahaan dalam negeri untuk bersaing dengan para kompetitornya dari negara serumpun. Apalagi kini eranya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perusahaan Indonesia sudah *'head to head'* dengan 10 negara ASEAN lainnya.

Pasalnya, di negara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, telah mengucurkan suku bunga rendah bagi dunia usahanya. Masing-masing sebesar, 5 persen, 4-6 persen, dan 3 persen.

"Nah kita? Masih tinggi. Kami dari dunia usaha sudah jengkel pada BI yang telat menurunkan suku bunganya," sembur pengganti Sofjan Wanandi di Apindo ini.

Setali tiga uang juga dialami oleh pengusaha kelas menengah. Thomas Darmawan, seorang pengusaha di bisnis makanan-minuman dan mantan Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) ini mengeluhkan masih tingginya suku bunga pinjaman dari perbankan.

Tak cuma suku bunga pinjaman yang membebannya, kebijakan pasokan bahan baku yang sangat dibutuhkan dunia usaha sektor ini pun tak jelas juntrungannya.

"Belum ada dukungan konkret dari pemerintah," cetus dia melalui pesan singkat kepada Majalah Aktual belum lama ini. "Suku bunga kredit masih mencekik dan supply bahan baku juga belum terasa manfaatnya. Mestinya segera turun (suku bunga kredit)," kecamnya lagi kesal.

Lantas seberapa besar sih mujarabnya penurunan BI Rate ini dapat menurunkan landing rate? Pasalnya, tak hanya kalangan berkantong tebal saja yang merasa keberatan dengan suku bunga tinggi, yang sudah pasti masyarakat umum pun ikut menanggung beban beratnya.

Memang untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah dipatok 9 persen, tapi bagi kredit komersial seperti kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit lain yang menyentuh masyarakat luas masih belasan juga suku bunga pinjamannya.

"Kami sudah minta berkali-kali ke Pak Agus (Agus Martowardojo-Gubernur BI) agar menurunkan BI Rate-nya," tandas Hariyadi lagi.

BI sendiri di bawah kepemimpinan Agus Martowardojo sempat mencuatkan pesimisme publik, karena mengusung kebijakan suku bunga tinggi. Sepanjang 2015, rezim suku bunga tinggi terus berlanjut. BI sempat melambungkan BI Rate di level 7,75 persen dan



Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (kanan) didampingi Deputy Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara (kiri) memaparkan hasil Rapat Dewan Gubernur BI yang membahas BI Rate, Jakarta, Kamis (18/2).

bertahan lama di angka 7,5 persen. Sangat kontras dengan kebijakan pendahulunya Darmin Nasution -sekarang Menteri Koordinator Perekonomian - yang sangat pro pada suku bunga rendah.

Namun setelah desakan pemerintah cukup masif dengan ditandai 'intervensi'-nya Menko Darmin pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, maka sejak awal tahun ini, independensi BI mulai "luntur". BI mau mendengarkan saran pemerintah untuk menurunkan suku bunga kreditnya.

Akhirnya, sejak medio Januari,



BI melonggarkan suku bunganya dari 7,5 persen menjadi 7,25 persen. Dan berlanjut di Februari dengan menurunkan 25 basis points (bps) menjadi 7 persen.

Plus kebijakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam rupiah yang semula 7,5 persen menjadi 6,5 persen yang akan efektif per 16 Maret 2016 ini. Kebijakan ini menjadi stimulus lanjutan, setelah pada November tahun lalu BI menurunkan GWM 50 bps dari 8 persen ke 7,5 persen.

Menurut Agus, dengan kebijakan ini dapat kian melonggarkan likuiditas dunia perbankan yang selama ini sangat ketat. Bahkan dengan dua stimulus itu, akan mendatangkan likuiditas senilai Rp34 triliun. Dengan begitu kinerja perbankan akan semakin stabil dan

efisien.

"Pada akhirnya bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Karena perbankan diharapkan dapat menyesuaikan suku bunga kreditnya," tandas Agus.

BI optimis pertumbuhan ekonomi ke depannya akan lebih mendekati target pertumbuhan yang diproyeksikan bank sentral ini sebesar 5,2-5,6 persen. Akan tetapi, dengan kebijakan ini pihaknya lebih optimis, yang semula lebih berat ke batas bawah menjadi sangat mungkin ke batas tengah.

"Jadi pertumbuhan ekonomi kita bisa tembus di angka 5,4 persen," tandas mantan Menteri Keuangan ini.

Sehingga dengan likuiditas yang lebih longgar itu, perbankan akan lebih mudah menggulirkan kreditnya ke para debitur. Apalagi ada

tambahan likuiditas sebanyak Rp34 triliun tadi. Maka BI pun mengoreksi ke atas proyeksi pertumbuhan kredit 2016 menjadi 14 persen dari sebelumnya di rentang 10-12 persen.

Karena dengan GWM yang rendah akan berdampak pada peningkatan pengkoleksian dana pihak ketiga (DPK). Pada Desember 2015 pertumbuhan DPK perbankan tercatat sebesar 7,3 persen (yoy) atau lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 7,7 persen. Sedangkan pertumbuhan kredit mencapai 10,5 persen (yoy).

Untuk itu, BI akan terus menjaga kondisi likuiditas dalam perekonomian agar cukup untuk mendukung penyaluran kredit lebih lanjut. Selain itu, untuk mendukung transmisi penurunan suku bunga, kebijakan struktur suku bunga operasi moneter (term structure) juga diturunkan dengan kondisi likuiditas di masing-masing tenor.

Kondisi penggenjotan laju kredit memang menjadi salah satu alasan penurunan BI Rate dan GWM ini. Perry Warjiyo, Deputy Gubernur BI menambahkan, ada tiga alasan BI mengeluarkan kebijakan suku bunga ini.

Pertama, untuk menjaga likuiditas di dunia perbankan agar dapat terus mendorong pertumbuhan kredit, sehingga akan menggairahkan pertumbuhan perekonomian

nasional.

Kedua, perlunya kebijakan moneter yang lebih kuat, maka pilihannya adalah kombinasi kebijakan antara penurunan BI Rate dan GWM Primer. Karena transmisi kebijakan moneter ke perekonomian akan lebih kuat jika dua instrumen ini diturunkan.

Kalau hanya BI Rate saja hanya akan berdampak pada penurunan suku bunga pinjaman, tapi kalau ada stimulus GWM primer akan berimplikasi ke penurunan deposito, dan lainnya.

Dan ketiga, adanya bauran kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perbankan nasional.

"Jadi kami lakukan kombinasi relaksasi makroprudensial di bulan lalu dan saat ini kami dorong dengan menambah likuiditas," ujar Perry saat pengumuman BI Rate, medio Februari lalu.

Apalagi dengan kondisi inflasi yang terkendali dan bahkan di Februari itu terjadi deflasi 0,09 persen, maka kemungkinan BI Rate di Maret ini akan kembali diturunkan.

Jika terjadi seperti itu, seyogyanya dapat menurunkan suku bunga kredit atau *lending rate*, pasalnya suku bunga dasar kredit (SBDK) pun sebagai dasar penentuan *lending rate* juga harusnya rendah.

Reaksi Perbankan

Dengan penurunan BI Rate ini, rata-rata perbankan belum secara otomatis menurunkan suku bunga kreditnya. Mereka mengaku masih terbebani dengan adanya biaya dana atau *cost of fund* yang masih tinggi.

Salah satunya karena bunga yang diberikan kepada nasabah, baik itu melalui deposito atau lainnya meminta suku bunga yang juga tinggi. Sehingga perbankan kesulitan untuk memperoleh dana-dana murah. Sehingga yang terjadi biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga tinggi dengan selisih bunga bersih atau net interest margin (NIM) juga tinggi.

"Mungkin di kuartal keempat tahun ini baru kami turunkan suku bunga kreditnya," sebut Direktur Utama PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk, Ahmad Irfan belum lama ini dengan menambahkan di tahun ini target NIM masih lumayan tinggi, sebesar 6,3 persen.

Kondisi tersebut dipicu salah satunya oleh adanya dana-dana pemerintah dan dana milik BUMN yang disimpan di perbankan menuntut dilayani dengan suku bunga tinggi.

Sehingga perbankan pun akan berlomba untuk menawarkan suku bunga tinggi demi mengejar dana besar tersebut agar DPK-nya bisa lebih gemuk. Tapi yang terjadi, malah bank-bank akan kian tidak efisien lagi.

"Kami memang selalu mendukung keinginan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar suku bunga kredit bisa single digit," ujar Irfan.

OJK sendiri memang meminta dunia perbankan mesti lebih efisien. Untuk itu pihaknya akan memberikan insentif jika mereka dapat nerlaku lebih efisien. Insentifnya sendiri yang akan diberikan beragam sesuai dengan tingkat efisiensinya.

"Misalnya dalam kemudahan membuka kantor cabang. Akan kami atur dalam Peraturan OJK," tandas Ketua OJK, Muliaman Hadad.

Terganjil Inflasi

Deputi Senior BI, Mirza Adityaswara mengakui penurunan suku bunga kredit perbankan itu masih terganjal adanya angka inflasi yang secara rata-rata dalam bertahun-tahun masih di angka 5 persen.

Untuk itu, laju inflasi yang rendah di tahun lalu jangan naik lagi menjadi 5 persen. "Kalau itu terjadi suku bunga kredit akan susah turun," kata Mirza.

Dengan inflasi yang sebelumnya tinggi memang membuat *cost of fund* perbankan juga tinggi. Tahun-tahun sebelumnya, bisa mencapai 8 persen. Dengan inflasi tinggi akan membuat deposan minta membayar bunga dananya di atas inflasi.

Dengan begitu, dirinya menyambut paket insentif yang



Seorang ibu pekerja menyelesaikan pengecatan pesanan mainan untuk taman kanak-kanak di industri mainan rumahan, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/2). Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan optimis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan tumbuh signifikan selama periode 2016 pasca penurunan suku bunga KUR dari 12 persen menjadi 9 persen per tahun oleh pemerintah.

diusung OJK untuk bank-bank yang mampu memperbaiki efisiensinya, baik di sisi overhead, margin keuntungan, serta risk premium atau non performing loan (NPL).

Menurut Mirza, komponen overhead cost perbankan di Indonesia



jauh lebih tinggi di banding negara tetangga. Bahkan BOPO juga lebih tinggi, perbankan nasional BOPO masih 80 persen, sedang negara ASEAN lain bisa 40 persen. Makanya tantangan perbankan harus dapat menekan overhead cost-nya.

"Kita harus bisa menurunkan overhead costnya agar efisien. Bank harus bisa *manage* biaya-biaya supaya *overhead cost*-nya turun. Saya yakin bisa, Thailand, Filipina saja bisa kenapa kita tidak," tegas Anggota Dewan Komisiner OJK Ex-Officio BI ini.

Dengan bisa mempertahankan

inflasi rendah, Mirza berharap maka bunga dana juga menjadi rendah. Sehingga, NIM perbankan juga tidak mengincar tinggi.

Saat ini NIM perbankan di Indonesia masih jauh lebih tinggi bila dibandingkan negara lain. "NIM perbankan Indonesia tercatat rata-rata 5,39 persen dengan suku bunga kredit double digit yakni 12,87 persen," katanya.

Sementara di Thailand, NIM-nya sebesar 2,60 persen dengan suku bunga kredit 7,10 persen dan Filipina NIM-nya 3,35 persen dengan suku bunga kredit 6,86 persen.

SBDK atau prime lending rate (PLR) menjadi perhitungan komponen biaya kredit sebelum memperhitungkan premi risiko. SBDK terdiri dari tiga komponen, cost of fund, overhead cost, dan margin.

Misalkan, jika cost of fund 6,22%, overhead 2 %, dan margin 2 %, maka didapat SBDK-nya sebesar 10,22 %. Nah untuk lending rate sendiri berasal dari SBDK ditambah risk premium. Jika risk premium, misal, 1,5%, maka suku bunga kredit yang didapat sebesar, $10,22\% + 1,5\% = 11,72\%$. ■ *Busthomi*



BI Turunkan BI Rate dan GWM Primer

Bank Indonesia (BI) kembali melonggarkan kebijakan suku bunga acuan (BI Rate) dan Giro Wajib Minimum (GWM). Setelah sebulan sebelumnya BI menurunkan suku bunga acuan dari 7,5 persen menjadi 7,25 persen, kali ini BI Rate yang semula 7,25 persen diturunkan 25 bps menjadi 7,0 persen. Sementara GWM Primer juga ikut diturunkan dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen atau dipangkas sebesar 1 persen.

“Karena dari kondisi moneter perlu ada likuiditas tinggi dan ada ruang untuk dilonggarkan, maka saat ini kami respon dengan menurunkan BI Rate dan GWM primer,” kata Gubernur BI, Agus Martowardojo usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Gedung BI, Jakarta, Kamis (18/2).

Namun Agus menambahkan penurunan GWM Primer ini tidak otomatis berlaku. Akan tetapi akan mulai efektif pada 16 Maret 2016 nanti. Dengan adanya penurunan BI Rate dan GWM Primer ini diharapkan dapat mendorong upaya penggenjotan likuiditas lebih lanjut. Bahkan dengan adanya pelonggaran

dua kebijakan ini, akan menambah likuiditas perbankan sebanyak Rp34 triliun.

“Jadi dengan penurunan ini akan menambah likuiditas perbankan mencapai Rp34 triliun. Sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi,”

BI tambah Agus tetap mematok pertumbuhan di kisaran 5,2-5,6 persen. “Namun dengan kebijakan ini kami lebih optimis. Sehingga yang semula lebih batas bawah, tapi saat ini lebih ke batas tengah. Jadi bisa di 5,4 persen,” pungkash dia.

Usai menurunkan BI Rate dan GWM Primer, Bank Indonesia keesokan harinya menggelar pelatihan untuk wartawan di Bandung (19-21 Februari 2016) berkenaan dengan kebijakan moneter yang baru saja dikeluarkan. Deputy Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara mengharapkan ke depannya lebih banyak instrumen likuiditas di pasar keuangan sehingga stabilitas pasar keuangan lebih terjaga ke depannya.

“Bank Indonesia ingin di setiap tenor dari kurva operasi moneter itu ada instrumen pasar yang

berkembang. Sekarang belum,” ujar Mirza saat membuka pelatihan.

Menurut Mirza, pendalaman pasar keuangan memang harus didorong dengan menciptakan berbagai instrumen di luar pasar uang antar bank (PUAB). “Adakah instrumen pasar selain PUAB? Ada tidak untuk tenor tujuh hari, tenor dua minggu, satu bulan, dua bulan? Belum ada,” kata Mirza.

Bank sentral sendiri menyatakan akan terus mendorong pendalaman pasar keuangan terutama di pasar modal, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Jadi, instrumen-instrumen di bawah satu tahun, BI mendorongnya di pasar modal, tapi juga harus berkolaborasi dengan OJK,” katanya lagi.

BI dalam melakukan operasi moneter menggunakan instrumen deposit facility (Fasbi) untuk overnight, reverse repo surat utang negara (RR SUN) untuk tenor satu minggu, dua minggu, dan dua bulan.

Sementara itu, untuk tenor tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, dan 12 bulan, BI menggunakan instrumen sertifikat deposito Bank Indonesia (SDBI).

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Solikin M. Juhro memaparkan perkembangan terkini, tantangan, dan prospek ekonomi Indonesia dapat digambarkan seperti diagram berikut:

Ekonomi Indonesia kata Solikin sangat bergantung dengan kondisi global, yang dipengaruhi oleh kebijakan perbaikan ekonomi AS, pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan harga minyak mentah dunia.

Menurut Solikin, perbaikan ekonomi AS sampai saat ini belum kuat. Indikator ini dapat dilihat dari tertahannya pemulihan ekonomi AS didorong masih belum kuatnya konsumsi, melambatnya perbaikan sektor perumahan, lemahnya perbaikan sektor tenaga kerja, dan terkonsentrasinya sektor manufaktur.

“Ekonomi AS Q4-2015 tumbuh 1,8% (yoy) atau lebih rendah dari estimasi. Untuk keseluruhan tahun 2016, perekonomian AS dikoreksi dari

2,7% menjadi 2,6%,” terang Solikin.

Solikin menambahkan ekonomi Tiongkok juga masih dalam tren melambat antara lain akibat masih lemahnya sektor manufaktur, dan investasi, sejalan dengan proses deleveraging yang dilakukan oleh sektor korporasi.

“Pertumbuhan ekonomi Tiongkok 2016 diperkirakan 6,3%, turun dari 6,9% di 2015. Menurut IMF (2016) Penurunan PDB Tiongkok 1% dapat menurunkan ekonomi Indonesia 0,3%,” terangnya.

Harga minyak di Tahun 2015 kata Solikin turun 47% dibandingkan 2014, dan berlanjut di awal 2016 hingga mencapai titik terendah USD26,4/barel.

“Dipengaruhi melimpahnya supply, masih tingginya inventory, dan lemahnya permintaan. Pasokan OPEC akhir 2015 meningkat mencapai 32,9 mbpd akibat Irak dan Arab Saudi yang pertahankan pangsa pasar nya. Permintaan turun akibat ekonomi global yang diperkirakan masih lemah,” tambah dia.

Ekonomi Indonesia juga dipengaruhi kondisi domestik. Untuk kondisi domestik saat ini lanjut Solikin, aliran masuk modal asing meningkat terutama di pasar SUN sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi dan meredanya risiko

pasar keuangan global.

“Persepsi positif terkait dengan penurunan BI Rate, paket kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, serta semakin efektifnya implementasi berbagai proyek infrastruktur. Meredanya pasar keuangan tercermin dari perkiraan path FFR yang lebih dovish,” jelasnya.

Selain itu tambahnya nilai tukar rupiah mencatatkan penguatan di Triwulan IV 2015, sampai berlanjut di awal 2016.

PDB triwulan IV 2015 kata Solikin juga meningkat karena ditopang belanja pemerintah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh meningkatnya peran Pemerintah, baik dalam bentuk konsumsi pemerintah maupun investasi infrastruktur. Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat serta penurunan harga komoditas berdampak pada masih menurunnya ekspor.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan IV 2015 kata dia mencatat surplus ditopang oleh surplus TMF yang meningkat. Peningkatan surplus TMF tersebut didukung oleh meningkatnya arus masuk modal asing, seiring dengan menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global dan membaiknya

keyakinan terhadap prospek perekonomian Indonesia. Meski meningkat pada triwulan IV 2015, secara keseluruhan tahun 2015, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 2,06% PDB, jauh lebih rendah dari 3,09% PDB pada tahun 2014.

Proses konvergensi inflasi IHK menuju inflasi inti cenderung lebih cepat pasca ITF. Koordinasi kebijakan BI bersama Pemerintah semakin baik dalam mengendalikan tekanan inflasi dari sisi penawaran. Data empiris menunjukkan setelah terjadi shocks, inflasi IHK kembali path semula dan cenderung konvergen menuju inflasi inti. Kecepatan konvergensi meningkat hampir 2 kali lipat pasca implementasi ITF.

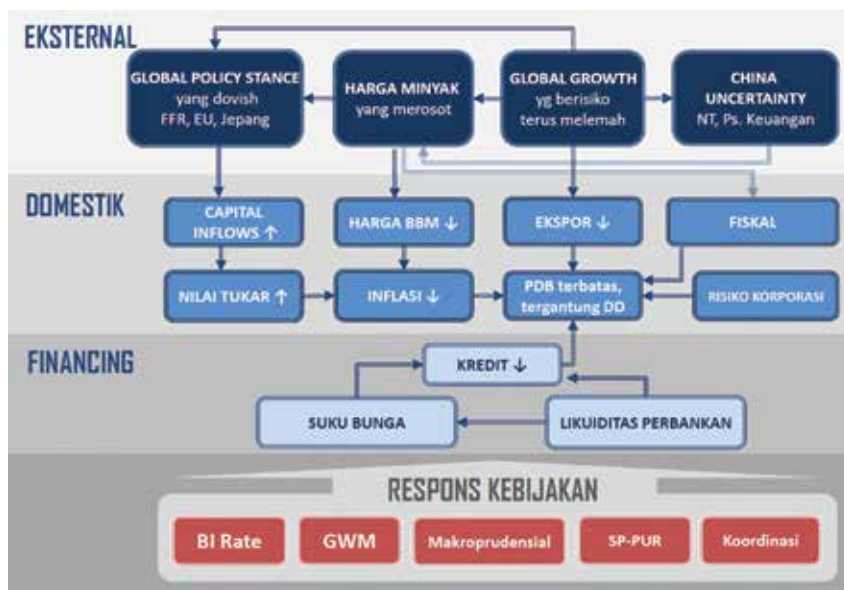
“Inflasi inti tergolong rendah, yaitu 0,29% (mtm) atau 3,62% (yoy), ditopang oleh terjaganya ekspektasi inflasi dan masih rendahnya tekanan permintaan. Kelompok administered prices mengalami deflasi, terutama didorong oleh penurunan harga BBM, tarif angkutan udara dan harga LPG 12 kg. Inflasi pada kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food) relatif terkendali di tengah terjadinya gejala El Nino,” terangnya.

Oleh karena itu kata Solikin, BI optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat menjadi 5,2-5,6 persen.

Pertumbuhan tersebut terang dia didorong stimulus fiskal, khususnya realisasi pembangunan proyek infrastruktur yang semakin cepat. Investasi swasta diharapkan akan meningkat, seiring dengan dampak paket kebijakan pemerintah yang terus digulirkan dan pemanfaatan ruang pelanggaran moneter secara terukur dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

“Trend penurunan harga minyak dunia diharapkan dapat mendorong penurunan tekanan inflasi. Inflasi tahun 2016 diyakini akan berada di sekitar titik tengah kisaran sasaran inflasi 4,0±1% . Defisit transaksi berjalan diperkirakan terkendali dibawah 3% PDB,” pungkasnya. ■

Arbie Marwan



Kesal Rezim SBY Tak Bangun Kilang, Jokowi: Tahun Ini Negara Mana Saja Boleh!



Presiden Joko Widodo tegaskan akan tetap memulai membangun kilang minyak tahun ini. Hal ini disampaikannya pada saat memberi kata sambutan pada acara

penandatanganan kontrak kegiatan strategis tahun anggaran 2016 Kementerian ESDM di Jakarta.

Menurut Jokowi pemerintah sebelumnya tidak pernah berpikir untuk membangun kilang, dengan demikian pada tahun ini dia sudah mengambil keputusan untuk membangun kilang minyak.

“Pembangunan kilang saya ingatkan sudah berapa tahun kita tidak pernah berpikir membangun, membuat, memperbaiki kilang. Tahun ini harus sudah diputuskan kilang dibangun,” tegasnya, Senin

(29/2).

Dia menambahkan bahwa pembangunan kilang bertujuan memotong siklus rantai pasokan minyak agar tidak terlalu panjang.

Kemudian dia mengizinkan bagi negara manapun yang memiliki minat investasi dalam pembangunan tersebut.

“Silahkan negara manapun yang punya crude oil silahkan bangun. Buat stok disini. Supaya rantai pasok tidak terlalu panjang, tidak usah lewat tradier lagi. Negara manapun silahkan. Mau buat dicilacap, Tuban, Bontan, Indonesia Timur, Indonesia barat, silahkan. Karena kebutuhan kita banyak sekali,” tuturnya. //Arbie Marwan

Rini Ingin Jual Bank BUMN Syariah, Ini Tanggapan BEI

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio menyayangkan sikap Menteri BUMN, Rini Soemarno yang ngotot mau menjual saham bank BUMN syariah kepada investor strategis, terutama dari asing.

Langkah itu menurut dia, sangat memungkinkan asing menjadi mayoritas. Sehingga kendali di perusahaan bank BUMN syariah itu bakal dikendalikan asing.

Menurut Tito, langkah merger empat bank BUMN syariah itu memang bagus. Namun jika harus lepas saham, pilihannya lebih ke pasar modal, dari pada dilepas ke investor asing.

“Kami memang sedang meminta waktu Bu Rini (Rini Soemarno, Menteri BUMN) untuk ketemu. Sayang, dia belum ngerespon,” jelas dia, di Jakarta, Jumat (26/2).

Tito menambahkan, jika dilakukan melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO), pihaknya sangat mendorong langkah ini agar publik juga bisa memiliki, tidak semua oleh asing.

“Cuma beliau belum ada waktu. Makanya boleh disampaikan ke Bu



Rini, Pak Tito mau ketemu,” tegas dia lagi.

Seperti diketahui, Menteri BUMN telah menyetujui tiga bank BUMN syariah, PT Bank Syariah

Mandiri, PT BRI Syariah, dan PT BNI Syariah, dan satu Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT BTN (Persero) Tbk, untuk menawarkan sahamnya ke investor strategis.

Sejauh ini asa investor asal Timur Tengah yang tertarik, tapi mereka maunya dalam posisi mayoritas.

Sebelumnya, Deputi Pengawas Perbankan OJK, Mulya E Siregar mengingatkan, mitra strategis pada



tahap awal investor dapat langsung menjadi pemegang saham dengan porsi 40 persen sebagai batas maksimal. Batasan itu diperlukan untuk memastikan keseriusan investor tersebut .

“Setelah tiga periode penilaian tingkat kesehatan atau 1,5 tahun maka bisa nambah porsi saham jika penilaiannya bagus,” ungkap dia.

Menurutnya, satu pihak investor dapat dikatakan sebagai pemegang saham pengendali jika telah memegang 25 persen saham. “Tapi kan kalau bicara aturan, kepemilikan asing di perbankan nasional bisa mencapai 99 persen. Kalau asing tertarik ya sangat mungkin jadi mayoritas,” cetus dia. //Arbie Marwan

BEI: Asing Tak Akan Bisa Kuasai BUMN IPO



Direktur Penilaian Perusahaan PT BEI, Samsul Hidayat mengatakan bahwa sebagian BUMN sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Namun, ketika sebagian saham BUMN yang sudah *initial public offering* (IPO) dimiliki publik, termasuk sahamnya dibeli oleh Perusahaan asing, pemerintah tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap BUMN tersebut.

“*Initial public offering* (IPO) tidak sampai mengubah kontrol BUMN ke asing. Karena tetap saja kontrol ada di tangan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (19/2).

Menurutnya, BUMN yang telah melantai di bursa saham, kinerjanya terus dipantau tidak hanya oleh BEI tapi juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk masyarakat yang memiliki saham di perusahaan BUMN tersebut, sehingga lebih transparan pengelolaan perusahaannya.

“Dengan adanya tambahan pemegang saham, akan membawa manfaat tambahan berupa profesionalisme pengelolaan BUMN,” katanya.

Dengan transparannya pengelolaan perusahaan BUMN yang melantai di bursa saham, hal ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau korupsi ditubuh BUMN tersebut.

Seperti diungkapkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Menurutnya keterbukaan kinerja tersebut seharusnya jangan menjadi sebuah ketakutan bagi BUMN yang ingin melantai di bursa. Keterbukaan tersebut seharusnya menjadi sebuah keuntungan.

“Ya jelas, karena ini kinerjanya

diawasi publik, laporan-laporan kinerjanya kan bisa harus dipublikasikan baik di media masa atau website BEI, ini bisa mengantisipasi tindak korupsi juga,” kata Said.

Sementara itu, Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menambahkan, BUMN yang telah melantai di bursa hampir bisa dipastikan kondisi perusahaannya lebih sehat.

“Karyawannya juga lebih profesional, mereka semangat kerjanya bertambah, karena perusahaan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik, agar meyakinkan investor,” terangnya.

Senada, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menambahkan, BUMN yang IPO tentunya memiliki bisnis yang bagus dan sehat. Apalagi juga dimiliki oleh pemerintah.

“Kepercayaan itu besar apalagi milik pemerintah. Dengan privatisasi juga membantu pasar modal Indonesia. Investor lama senang dan menjaring investor baru. Karena bila saham BUMN dilepas ke publik maka investor baru juga ingin masuk,” ujar Tito.

Karena itu, ia mengharapkan pemerintah dapat mendorong BUMN melepas saham ke publik setiap tahun. Selain itu, ada juga diberikan insentif kepada BUMN yang ingin melepas sahamnya ke publik.

Dari data Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), beberapa BUMN yang sahamnya dimiliki perusahaan asing diantaranya :

1. Bank BRI 38,59%
2. Semen Indonesia 38,22%
3. Telkom 38,35%
4. PGN 35,26%
5. Bank Mandiri 31,88%
6. Bank BNI 29,15%
7. Bank BTN 25,49%
8. Jasa Marga 14,51%
9. Bukit Asam 13,76%
10. Wijaya Karya 11,14%
11. Adhi Karya 10,40%

Bersaing di MEA, Ini 3 Jurus Ala Menko Rizal Ramli

Dibukanya keran persaingan global di kawasan ASEAN melalui kesepakatan MEA, menuntut Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan berbagai strategi.

Untuk itu, menurut Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli ada tiga jurus yang handal dalam memenangkan persaingan MEA.

“Ada 3 cara yang bisa ditempuh untuk memenangkan MEA,” katanya dalam pembukaan seminar yang diselenggarakan oleh Kefegama Initiative di Jakarta, Selasa (16/2).

Tiga jurus yang dimaksud Menteri Rizal adalah dengan cara mencari bantuan dari negara barat atau lembaga bantuan asing, tetapi jelasnya, hal ini dapat berisiko terhadap intervensi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Selanjutnya jurus yang kedua, melalui cara mendapatkan bantuan dari 2 negara terbesar di Asia yang memiliki kelebihan likuiditas, yaitu Tiongkok dan India, namun jelasnya, hal ini dapat berisiko menggelembungkan hutang negara.

Kemudian cara terakhir yakni mengandalkan kekuatan sendiri dengan memperkuat Ekonomi Kerakyatan, atau ekonomi yang berbasis kekuatan anak negeri serta konsumsi dan pembangunan dalam negeri.

Selain itu dia juga menyampaikan bahwa pariwisata Indonesia memiliki potensi dan area wisata yang jauh lebih besar dari seluruh negara ASEAN.

Namun dia mencermati rata-rata wisatawan yang datang ke Indonesia hanya 10 juta turis per tahun, jauh di bawah Thailand yang lebih dari 30 juta turis dan Malaysia yang mencapai sekitar 27 juta turis, keduanya dengan lahan yang jauh lebih kecil dari Indonesia.

Untuk itu dia menegaskan bahwa sektor pariwisata akan menjadi fokus dirinya untuk melakukan pengembangan, di samping sektor-sektor lainnya. /Arbie Marwan



Pro dan Kontra LGBT di Tingkatan Internasional

Pro dan kontra tentang LGBT yang marak di Indonesia saat ini sebenarnya juga terjadi di tingkatan internasional, antar-negara, dan di dalam lembaga PBB sendiri. Pertarungan ini masih terus berlangsung.

Polemik tentang hubungan sesama jenis, yang tercakup dalam isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) meramaikan media di Indonesia akhir-akhir ini. Sebetulnya secara sosial kehadiran kaum LGBT bukan hal baru di Indonesia. Sampai tahap tertentu, kehadiran kaum LGBT juga disadari dan ditolerir.

LGBT menjadi masalah dan isu yang panas, ketika timbul kesan bahwa gaya hidup LGBT ini seolah-olah akan “dipasarkan” meluas, dan bahkan akan mendapat pengesahan hukum. Antara lain, dalam bentuk pengakuan terhadap pernikahan sesama jenis, yang sudah ada presedennya di sejumlah negara lain. Di Indonesia, undang-undang belum memberi peluang, karena yang disebut “pernikahan” adalah antara laki-laki dan perempuan, bukan antara sesama laki-laki atau sesama

perempuan.

Kampanye LGBT mendorong munculnya undang-undang antidiskriminasi, dan mengupayakan perubahan peraturan daerah yang mendiskriminasi LGBT. Undang-undang yang berpotensi menjadi sasaran perubahan dalam kampanye LGBT adalah UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, terkait reproduksi. Ini juga terkait UUD 1945 Pasal 29 ayat 1.

Sejumlah komunitas, kelompok, dan individu tertentu dituding sebagai pelaku, penganjur, atau pendukung gaya hidup LGBT. Tuduhan itu umumnya berasal dari kalangan agama. Yang menarik, tuduhan “pro-LGBT” itu bukan cuma ditujukan pada komunitas, kelompok, dan individu tertentu di Indonesia, tetapi juga menyasar ke lembaga

internasional.

Salah satu lembaga yang jadi “tersangka utama” pendukung LGBT dan punya program untuk “memasarkan LGBT” di Indonesia itu adalah badan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), United Nations Development Programme (UNDP). UNDP menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID (badan bantuan pemerintah Amerika Serikat) untuk mendukung komunitas LGBT.

Memajukan Kesejahteraan LGBTI

Bahkan dana sebesar 8 juta dollar AS (sekitar Rp 108 miliar) dikucurkan dengan fokus ke empat negara: Indonesia, China, Filipina, dan Thailand. “Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI), dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI),” bunyi pernyataan UNDP di situs resminya, 12 Februari 2016.

Yang dimaksud dengan interseks adalah variasi karakteristik kelamin (termasuk kromosom, gonad, dan alat kelamin), yang membuat seseorang tidak dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Variasi ini meliputi ambiguitas jenis kelamin dan kombinasi genotip kromosom dan fenotip seksual selain XY (laki-laki) dan XX (perempuan).

Prakarsa tersebut, menurut UNDP, merupakan kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif, serta memberdayakan masyarakat sipil. Dalam keterangan di situsnya, UNDP menyebutkan, proyek ini dimulai pada Desember 2014 dan berlangsung hingga September 2017.

Sebetulnya soal dana, Kementerian Sosial RI juga mengeluarkan dana Rp 2,5 miliar pada 2015 untuk rehabilitasi LGBT. Menurut data UNDP/Kemensos, sebaran LGBT pada 2015 ada 500 orang, yang berada di Sumatra Utara,

Sumatra Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Namun data ini tampaknya belum menunjukkan angka nyata. Sedangkan sebaran waria di 34 provinsi pada 2012 ada 37.998 orang.

UNDP merinci beberapa tujuan dari proyek kemitraan regional ini. Salah satunya adalah mendukung kaum LGBTI untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Hasil yang ingin dicapai dari proyek ini antara lain adalah meningkatnya kemampuan organisasi-organisasi LGBTI untuk secara efektif memobilisasi, menyokong, dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas.

Pertarungan di Majelis Umum PBB

Berbagai diskusi tentang hak-hak LGBT di PBB umumnya berpusat pada resolusi-resolusi di Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) tentang topik tersebut. Sejak didirikan pada 1945, PBB belum mendiskusikan hak-hak LGBT (tentang kesetaraan tanpa memandang orientasi seksual ataupun identitas gender) sampai Desember 2008.

Saat itu, dengan diprakarsai Belanda/Perancis, sebuah pernyataan yang didukung Uni

Eropa dimunculkan di forum Majelis Umum PBB. Pernyataan itu, yang awalnya dimaksudkan untuk diadopsi sebagai sebuah resolusi, memicu munculnya pernyataan penolakan yang didukung Liga Arab. Hingga saat ini, kedua pernyataan yang pro dan kontra hak-hak LGBT itu tetap terbuka untuk ditandatangani, dan tak satu pun dari dua pernyataan itu yang sudah diadopsi secara resmi oleh Majelis Umum PBB.

Saat ini hubungan seks sesama jenis dinyatakan ilegal di 76 negara dan bisa dihukum mati di tujuh negara. Pada 1980-an, laporan-laporan awal PBB tentang penyebaran HIV/AIDS membuat beberapa acuan ke homoseksualitas. Sedangkan Indeks Kebebasan Manusia (*Human Freedom Index*) 1986 memasukkan pertanyaan spesifik, dalam menilai catatan hak-hak asasi manusia setiap negara, dalam kaitan keberadaan undang-undang kriminal yang melawan homoseksualitas.

Sejumlah 96 negara anggota PBB telah mensponsori deklarasi yang mendukung hak-hak LGBT di Majelis Umum, di UNHRC, dan di keduanya. Negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Israel, Jepang, Korea Selatan, umumnya mendukung hak-hak LGBT. Tetangga Indonesia yang mendukung hak LGBT adalah Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste.

Di antara mereka yang pertama menyuarakan penentangan terhadap deklarasi itu, pada awal Desember 2008, adalah Pengamat Tetap Tahta Suci (Vatikan) di PBB, Uskup Agung Celestino Migliore. Migliore mengklaim, deklarasi itu bisa digunakan untuk memaksa negara-negara untuk mengakui pernikahan sesama jenis.

“Jika diadopsi, deklarasi itu akan menciptakan berbagai diskriminasi baru dan sangat sulit dilawan. Misalnya, negara-negara yang tidak mengakui pengikatan sesama jenis sebagai ‘perkawinan’ akan dikecam

dan dijadikan sasaran tekanan,” ujarnya.

Indonesia Konsisten Menolak

Sebanyak 57 negara anggota PBB secara bersama-sama mensponsori pernyataan yang menolak LGBT pada 2008. Tiga dari negara-negara ini kemudian berubah sikap, menjadi mendukung resolusi pertama yang mendukung hak-hak LGBT pada 2011. Maka tersisa 54 negara yang tetap mensponsori pernyataan yang menentang hak-hak LGBT.

Indonesia bersama Malaysia, Brunei, Iran, Pakistan, dan negara-negara Arab termasuk yang konsisten menolak. Selain yang mendukung dan menentang, ada 44 negara yang tidak menyatakan dukungan atau pun penolakan resmi, salah satunya adalah China.

Markas PBB sendiri, dalam pengisian jajaran karyawannya, punya sikap terhadap LGBT. Pada Juli 2014, lembaga ini mengumumkan bahwa PBB (sebagai majikan) akan memberikan tunjangan yang setara kepada para karyawannya, yang telah melakukan pengikatan seks sesama jenis (*same-sex unions*) dalam yurisdiksi di mana yurisdiksi itu bersifat legal. Di bawah kebijakan baru itu, staf yang sudah menikah pasangan sesama jenis di dalam yurisdiksi akan menerima tunjangan yang sama, dan pengakuan sebagaimana pernikahan heteroseksual, tanpa mempedulikan apakah pernikahan sesama jenis itu legal di negara tempat asal kewarganegaraannya.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mendukung langkah ke arah penghormatan yang lebih besar terhadap hak-hak kaum gay dalam tahun-tahun terakhir. Ia menyatakan, “Hak-hak asasi manusia adalah inti dari misi PBB. Saya bangga untuk mendukung kesetaraan yang lebih besar bagi seluruh staf, dan saya menyerukan pada semua anggota keluarga PBB kita untuk bersatu, dalam menolak homofobia sebagai diskriminasi, yang tak akan pernah ditolerir di tempat kerja kita.” ■

Satrio Arismunandar





Atasi Masalah Kulit Wanita

Setiap perempuan pasti mendambakan kulit yang sehat, merah merona dan halus bercahaya. Karena dengan memiliki kulit wajah yang sehat tentu akan menambah rasa percaya diri bagi kaum hawa untuk bersosialisasi baik di dalam keseharian bermasyarakat maupun lingkungan kerjanya.

Padahal, perempuan tidak pernah mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan kulit wajah yang sehat. Oleh sebab itu, Majalah Aktual menanyakan perihal tersebut kepada dr. Gloria Noverita, SpKK, yang merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin. Menurut ia, kulit cantik itu kenyal, dan pori-pori di wajah mengecil.

"Kulit cantik itu ditandai dengan kulitnya halus, cerah dan bersinar.

Halus itu seperti pori-porinya kecil, teksturnya rata juga kenyal. Sedangkan, yang dimaksud cerah itu adalah warnanya rata merona kemerahan, bebas flek hitam. Dan bersinar itu seperti lembab, tidak kering atau pun berminyak," jelas dokter Gloria, di Jakarta, baru-baru ini.

Lebih lanjut dr Gloria mengatakan, bahwa masalah umum yang terjadi pada kulit wajah seorang wanita bersumber dari pori-pori wajah yang membesar. Mengingat kondisi di Indonesia beriklim tropis. Adalah hal yang wajar ketika pori-pori di wajah sebagian kaum hawa cenderung lebih besar. Sayangnya, banyak perempuan Indonesia merasa tidak sadar bahwa pori-pori besar merupakan masalah kulit wajah serta mengganggu.



pori-pori besar yakni, produksi kelenjar minyak. Jika berlebihan dan muncul terus-menerus dapat menyebabkan pori-pori wajah menjadi permanen. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan masalah lain pada wajah, seperti jerawat, komedo, kulit yang kusam, hingga menghambat wajah mulus merona.

Proses penuaan. Perlu diingat bahwa produksi kelenjar minyak tidak terus-menerus, yakni hanya pada usia 15-40 tahun. Pada usia 40 tahun ke atas seharusnya pori-pori mengecil. Kalau membesar, itu bisa disebabkan oleh jaringan kulit di sekitarnya yang melemah.

Seseorang yang menua kemudian terjadi kerusakan serat kolagen dan elastin. Struktur penunjang kulit yang rusak dan tidak muncul yang baru dapat mengakibatkan pori-pori wajah melebar. Terlebih karena tidak ada struktur yang dapat membuat kulit menjadi kencang.

Faktor genetik. Selain faktor produksi kelenjar minyak dan proses penuaan, penyebab munculnya pori-pori wajah membesar bisa disebabkan oleh adanya faktor genetik.

Gaya hidup. Gaya hidup dapat memicu peningkatan produksi kelenjar minyak. Hal tersebut yang

dapat membuat pori-pori wajah membesar.

Setelah mengetahui adanya faktor yang membuat pori-pori di wajah membesar, dokter Gloria menyarankan, agar segera mengatasi terlebih dahulu pori-pori besar di wajah sebelum melakukan perawatan kulit yang maksimal.

"Pori besar harus di atasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan hasil perawatan kulit yang maksimal," tegas ia sambil melempar senyum.

Lebih lanjut, dokter Gloria memaparkan solusi atas permasalahan dari pori-pori yang membesar tersebut. Ia kembali memberikan beberapa tips sehat bagaimana cara mengatasi kulit wajah yang mana berpori-pori besar.

"Untuk mengatasi kulit wajah dengan pori-pori besar, Pertama, Pilihlah pembersih yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Kedua, kita harus eksfoliasi kulit mati kita, lalu lakukan 'skin care' untuk mengecilkan pori," imbuhnya.

Untuk pemilihan 'skin care', saran dokter Gloria, agar memilih formula yang ringan, mengandung tabir surya serta memiliki zat aktif untuk mengecilkan pori-pori. ▢

Leonina K Lahama-Ferro Maulana

"Susah-susah gampang memang mengatasi tampilan pori besar di Indonesia yang iklimnya tropis. Karena panas dan lembab, wajah cenderung jadi berminyak. Bila produksi minyak terlalu banyak, pori akan melebar karena 'sebum' tersumbat," katanya lagi menjelaskan.

Sementara itu, pori-pori membesar merupakan akar dari permasalahan kulit wajah lainnya seperti muka kusam, flek hitam, jerawat, serta kulit berminyak. Dijelaskan oleh dokter Gloria, Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pori-pori besar di wajah. Di antaranya:

Produksi kelenjar minyak. Salah satu yang menyebabkan munculnya

Cantik di Mata Islam

Munculnya berbagai produk kecantikan, menjadikan wanita muslim menjadi tidak percaya diri terhadap 'inner beauty' yang telah Allah SWT berikan kepadanya sejak lahir. Dan, akan menunjukkan auranya ketika sudah mencapai akil baligh.

Para Muslimah harus percaya bahwa wanita tercantik adalah perempuan yang mampu memahami bahwa dia diciptakan dengan sebaik bentuk dan dia diciptakan yakni untuk beribadah kepada Allah SWT, "*Wa maa kholaqtuljinna wal insa illa liya'buduun*".

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. 51 : 56).

Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Bila ia baik maka baik pulalah seluruh tubuh. Dan, apabila ia rusak maka rusak pulalah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. (HR Bukhari dan Muslim).

Berbahagiaalah, ketika kecantikan itu bukan hanya sekedar menghiasi wajah, namun terutama hati dan akhlak kita. Karena kecantikan fisik pasti akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Tapi, kecantikan hati dan akhlak, itulah yang akan bersinar dan terus dikenang oleh orang-orang di sekitar kita.

"*Allahumma kamaa hassanta khalqii, fahassin khuluqii*."

"Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadian (fisik) ku, maka perindah pulalah akhlakku."

Tolak LGBT, PBNU: Pemerintah Harus Serius Berikan Rehabilitasi

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah untuk serius memberikan rehabilitasi terhadap pengikut LGBT (lesbian, gay, biseks dan transgender). Bahkan, PBNU menegaskan pemerintah wajib melakukannya. Hal ini karena PBNU menolak secara tegas akan paham dan gerakan komunitas LGBT. Karena PBNU menilai itu adalah bentuk penyimpangan dan mengingkari fitrah manusia.

“PBNU menolak tegas dengan paham dan gerakan yang membolehkan atau mengakui eksistensi LGBT. Karena LGBT



mengingkari fitrah manusia. PBNU menegaskan bahwa perilaku LGBT adalah perilaku yang tidak sesuai dengan fitrah manusia,” tegas KH Miftahul Akhyar, Wakil Ketua Rais Aam PBNU, kepada Aktual.com, di kantor PBNU Jakarta, Kamis (25/2).

“Dengan demikian, para pengidap LGBT harus direhabilitasi. Semua sumber daya, termasuk pemerintah

harus mengerahkan personelnya untuk merehabilitasi para pengidap LGBT,” lanjut ia.

Menurut Miftahul, pola rehabilitasi dilakukan sesuai faktor yang menyebabkannya. Oleh karena itu perlu adanya pengerahan sumber daya untuk rehabilitasi terhadap setiap orang yang punya kecenderungan terjerumus ke dalam LGBT.

“PBNU meminta pemerintah agar lebih serius memberikan rehabilitasi dan mewajibkannya. Dan PBNU juga menghimbau kepada seluruh dai dan khususnya warga NU, serta masyarakat Indonesia. Untuk bahu membahu menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka serta mendampingi untuk pemulihannya,” tandas Akhyar. *Ferro Maulana-Reffy Mulyadi*

Menag: LGBT Ancaman Serius bagi Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia



Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menilai fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) sebagai masalah sosial yang mengancam kehidupan beragama, ketahanan keluarga dan kepribadian bangsa.

“(LGBT juga) menjadi ancaman potensial bagi sistem hukum perkawinan di Indonesia yang tidak membenarkan perkawinan sesama jenis,” kata ia kepada jurnalis media, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (17/02).

Hal itu dikatakannya saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu. (Foto)

Dia mengatakan, Kementerian Agama meminta lembaga-lembaga keagamaan perlu mengambil langkah positif untuk mencari dan menggali akar penyebab seseorang menjadi LGBT.

Selain itu, menurut dia, segera melakukan upaya penanggulangannya berbasis pendekatan agama dan ilmu jiwa.

“Kita tidak boleh memusuhi dan membenci mereka sebagai warga negara, tapi bukan berarti kita membenarkan dan membiarkan gerakan LGBT menggeser nilai nilai agama dan kepribadian bangsa,” ujarnya.

Lukman juga memaparkan, mayoritas masyarakat Indonesia menolak legalisasi komunitas LGBT di negeri ini.

Hal itu menurut dia terlihat dari sejumlah organisasi keagamaan telah menyampaikan pernyataan sikap menolak LGBT dan berupaya mencari solusi dalam menemukan jalan untuk merehabilitasi diri “Para tokoh agama, para aktivis organisasi keagamaan lembaga pendidikan keagamaan dan lainnya perlu mendalami strategi untuk membendung fenomena LGBT yang

menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang religius,” katanya.

Dia menilai, penguatan kerjasama lembaga-lembaga keagamaan dan elemen masyarakat, serta peran aktif pers dan media massa lainnya yang peduli pada masalah ini perlu dikembangkan sebagai satu dari sekian banyak strategi.

Menurut dia, salah satu upaya mengantisipasi masalah LGBT yang mengancam generasi penerus adalah memperkuat fungsi keluarga sebagai pondasi ketahanan masyarakat dan bangsa.

“Dalam kaitan ini, Kementerian Agama mendorong upaya penguatan lembaga keluarga sebagai benteng pertahanan,” ujarnya.

Kemenag menurut dia, saat ini sedang mengembangkan optimalisasi kursus pra nikah bagi pasangan-pasangan yang mau menikah, konsultasi dan pembimbingan bagi keluarga, dan usaha mediasi bagi masalah keluarga.

Dia juga mengatakan, Kemenag menggandeng Bimbingan Penyuluhan Agama (BPA) dan ormas-ormas keagamaan dalam praktiknya.

/Ferro Maulana-Antara

Surat Edaran KPI untuk Stasiun TV Tidak Tayangkan Tontonan LGBT

Maraknya televisi saat ini yang menayangkan siaran yang 'kebancian' atau tontonan seronok cukup membuat masyarakat resah, apa lagi saat ini ditambah lagi dengan fenomena LGBT. Terutama kaum ibu, mereka khawatir dengan tontonan yang dilihat anak-anak mereka sebagian merupakan tontonan yang tak sehat.

Atas keresahan tersebut, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Beradab (GIB), pada Selasa (01/03) kemarin, dalam audiensi di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Jakarta memberikan dukungan atas keluarnya surat edaran tentang penyiaran atau penayangan program di televisi.

Surat Edaran yang di keluarkan oleh KPI dengan Nomor 203/K/KPI/02/16 yang ditujukan kepada Seluruh Direktur Utama Lembaga Penyiaran tertanggal 23 Februari, berisikan larangan pada stasiun televisi untuk menayangkan pria yang berperilaku serta berpakaian seperti wanita.

Lebih lanjut melalui surat tersebut, KPI mengingatkan kepada seluruh Lembaga Penyiaran agar tidak menampilkan pria sebagai pembawa acara (host), talent, maupun pengisi acara lainnya (baik pemeran utama maupun pendukung, red) dengan tampilan sebagai berikut:

1. Gaya berpakaian kewanitaan
2. Riasan (make up) kewanitaan
3. Bahasa tubuh kewanitaan, (termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, maupun perilaku lainnya)
4. Gaya bicara kewanitaan
5. Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan
6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita
7. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan.



Gerakan Indonesia Beradab yang di dalamnya termasuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dompot Dhuafa, sangat mendukung terbitnya surat edaran dari KPI tersebut. Surat edaran tersebut dinilai sebagai langkah penegakan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat yang selama ini telah dilanggar dalam praktek penyiaran di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan ini, secara langsung atau tidak, merupakan sebuah tindakan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, mereka berhak atas tayangan penyiaran yang mendidik dalam segala bentuk apapun, baik berupa berita, kegiatan, hiburan atau pengetahuan. Mengingat pula salah satu tujuan penyiaran yaitu, sebagai alat pembentuk karakter bangsa, bukan sebaliknya.

"Kami dari Dompot Dhuafa kerap menemani anak-anak miskin di Indonesia. Tentu tahu, televisi menjadi hiburan satu-satunya anak-anak miskin di Indonesia. Kini mereka nyaris terenggut masa depannya karena upaya-upaya legitimasi siaran televisi yang menyimpang. Sehingga kita yang di sini, terlebih KPI dapat mengawal siaran televisi dengan baik. Dengan adanya tayangan atau siaran televisi yang baik, itu sudah sangat besar perannya dalam menciptakan masa

depan anak-anak di Indonesia," ungkap Bambang Suherman, perwakilan dari PBH Dompot Dhuafa, kepada Aktual.com.

Ternyata semua perwakilan dalam audiensi tersebut memiliki keresahan yang sama, yaitu tentang masa depan generasi muda bangsa atas tayangan yang tidak sehat dan kurang beradab di layar televisi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu aktivis pemerhati anak, Elly Risman pada kesempatan tersebut.

"Kami semua bergabung di sini melakukannya karena Allah SWT, karena kami cinta Indonesia dan cinta akan keluarga. Maka kami memberikan dukungan penuh untuk KPI terus mengemban amanah sebagai kontrol penyiaran di Indonesia."

Menanggapi pernyataan dari perwakilan GIB, Wakil Ketua KPI, Idy Muzayyad menegaskan, salah satu dasar kebijakan KPI terkait dengan pelarangan perilaku kebancian adalah untuk melindungi generasi muda, khususnya anak-anak dan remaja.

Idy pun menjelaskan bahwa selama ini pihaknya mendapatkan pertanyaan dari pihak yang tidak setuju dengan KPI atas pelarangan dan surat edaran tersebut. Namun, kebijakan-kebijakan KPI lahir juga atas dasar pengaduan dan masukan publik, serta keresahan para orang tua.

"Kemudian ada yang bertanya 'publik yang mana?', ada juga yang bertanya 'aduan dari orang tua yang mana?'," ungkap Idy.

"Tetapi, kehadiran atau kedatangan Gerakan Indonesia Beradab, dapat sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bahwa benar kami tidak melakukan manipulasi, bahwasannya mayoritas memberikan masukan kepada KPI dan orang tua yang resah, serta gelisah terhadap penayangan yang mendorong pada perilaku seksual yang menyimpang itu," tambah Idy.

/Ferro Maulana

Memaknai Ulang Kemiskinan

Faizal Rizki Arief

Banyak definisi dan perspektif soal makna dan pengertian miskin dan kaya.

Miskin dan kaya, hampir sebagian besar pengertiannya selalu dikaitkan dengan ukuran-ukuran atau indikator material. Dalam tinjauan ilmu ekonomi misalnya, orang disebut miskin atau kaya lebih sering disandarkan dengan atribut pendapatan per hari.

Ada perbedaan antara si miskin dan si kaya.

Miskin dan kaya dalam skala global menggolongkan negara miskin, berkembang dan negara kaya (maju). Ukuran-ukurannya pun juga disandarkan pada atribut-atribut material seperti pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, tingkat buta huruf sampai ukuran tingkat kematian.

Ada perbedaan antara negara miskin dan negara kaya.

Yang menarik lagi, ketika bicara soal miskin dan kaya dalam beberapa pendekatan teori politik dan sosiologi. Dalam pendekatan pertentangan kelas misalnya, perbedaan antara kaum miskin dan kaum borjuis (kaya) faktor penting terjadinya perubahan. Kalau dilihat dari pendekatan akarpandang *Survival of the Fittest*, maka si miskin (yang lemah) hampir selalu diidentikkan sebagai korban dari yang kaya (yang kuat).

Ada perbedaan antara golongan miskin dan kaya.

Miskin dan kaya, dalam balut teori globalisasi jadi masalah sangat serius. Dan sangat dominan dalam perdebatan pro dan kontra. Atas nama pengelompokan global negara miskin, atau terjajah dan atau termarginalkan akibat ketidakadilan sistem ekonomi global maka terjadilah perselisihan serius dengan negara-negara yang dikelompokkan dalam negara kaya atau maju. Bahkan sudah menjurus ke peperangan global baru.

Perbedaan antara miskin dan kaya dalam beberapa hal menjadi faktor penting dalam menyumbang kehancuran pondasi-pondasi tegaknya akar kemanusiaan dalam sebuah peradaban.

Meninjau ulang Makna Miskin

Kalau kita kembali melihat teks suci kitab agama besar dunia saat ini, hampir sebagian besar tidak pernah ada yang mempertentangkan



bahkan membedakan antara miskin dan kaya. Miskin dan kaya itu adalah sebuah keniscayaan (sunnatulloh, dalam islam) dan faktor teramat penting yang membentuk sebuah peradaban yang mulia.

Sama seperti keniscayaan (sunnatulloh) lelaki dan perempuan. Perbedaan antara keduanya lah yang mendorong terciptanya sebuah komunitas harmoni kecil: keluarga. Berkumpulnya komunitas harmoni keluarga inilah yang akan menopang dan menegakkan sebuah peradaban.

Begitu pula dengan miskin dan kaya. Perbedaan antara keduanya harusnya mendorong terciptanya sebuah 'harmonis keluarga' baru yang mampu menegakkan sebuah peradaban. Bukan sebaliknya, miskin dan kaya dipaksa terus menerus untuk selalu bercerai, selalu jalan sendiri-sendiri atau bahkan saling sikut dan berselisih.

Akibat terus menerus memahami miskin dan kaya adalah sebuah perbedaan maka alam bawah sadar kita selalu mengatakan miskin dan kaya adalah sebuah perselisihan bahkan lebih jauh: pertengkaran atau peperangan. Dan salah satu akibatnya (sangat fatal menurut saya) munculnya prinsip baru: "Salah satu keberhasilan pembangunan adalah angka kemiskinan turun".

Perlu dipikirkan kembali bagaimana memaknai kembali filsafat gotong royong yang sampai sekarang hanya sering jadi ucap saja.

Karena sesungguhnya gotong royong adalah jembatan emas yang menghubungkan antara miskin dan kaya agar bisa menjadi sebuah "keluarga" yang harmonis. ■



Berita teraktual tersaji,
untuk Anda mengawali hari ...

Info Dan Pemasaran :

☎ 0812 053 8776 (Deddy) | 0818 2809 41 009 (Rhiza)

✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com

🌐 www.aktual.com

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

☎ Dedy **081 20 53 8776**
Rhiza **081 828 0941 009**

✉ marketing@aktual.com
iklan@aktual.com